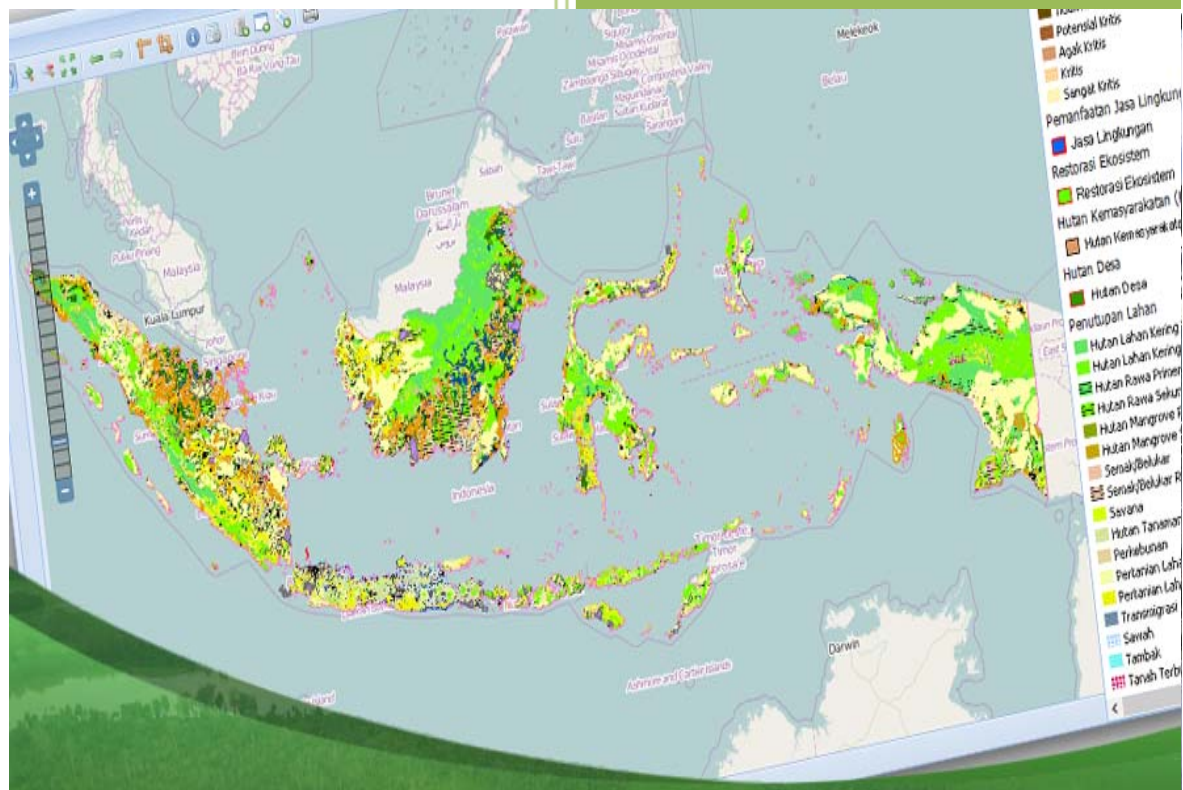




2017

LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

KATA PENGANTAR

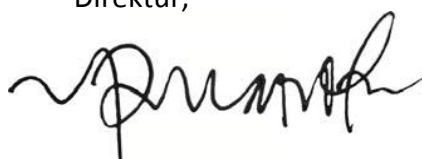
Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berkomitmen terus mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dan, kiranya laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2018

Direktur,



Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.

NIP. 19620301 198802 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Susunan Organisasi.....	2
D. Aspek Penunjang.....	6
E. Pengertian.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. Sasaran dan Indikator Program.....	12
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	12
C. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Metoda Pengukuran Kinerja.....	14
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	15
BAB IV PENUTUP.....	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017 Berdasarkan Golongan.....	8
Tabel 2. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
Tabel 3. Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017.....	9
Tabel 4. Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017.....	12
Tabel 5. Sasaran, Target dan Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Tahun 2017.....	16
Tabel 6. Kegiatan Rinci Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017.....	17
Tabel 7. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Pokok Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017.....	22
Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017.....	27
Tabel 9. Persiapan/Pemilihan Areal IUPHHK-HA/HT dengan citra resolusi sedang Tahun 2015.....	32
Tabel 10. Capaian Dari Indikator Kinerja Kegiatan Data dan Peta SDH Mendukung Pengalokasian KH untuk Perhutanan Sosial Tahun 2017.....	40
Tabel 11. Rincian Penyusunan Buku Data dan Informasi Tahun 2017.....	41
Tabel 12. Capaian Dari Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH Tahun 2017.....	44
Tabel 13. Penutupan Lahan Indonesia (Ribu Ha).....	45

Tabel 14.	Sebaran Penutupan Lahan Berhutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan.....	45
Tabel 15.	Penutupan Lahan Berhutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribuan Ha)	46
Tabel 16.	Angka Deforestasi per Fungsi Kawasan (Ribuan Ha) Tahun 2015 – 2016.....	47
Tabel 17.	Angka Deforestasi Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2015 – 2016.....	47
Tabel 18.	Angka Deforestasi pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribuan Ha) Tahun 2015 – 2016.....	47
Tabel 19.	Penyempurnaan Perdirjen PKTL Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 terhadap Perdirjen PKTL Nomor : P.3/VII-IPSDH/2014.	62
Tabel 20.	Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB Hingga Tahun 2016...	63
Tabel 21.	Luas Moratorium Berdasarkan Kriteria Pada PIPPIB Revisi XII Dan XIII.....	65
Tabel 22.	Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Revisi XII.....	65
Tabel 23.	Luas Keterangan Perubahan pada PIPPIB Revisi XIII.....	66
Tabel 24.	Pelayanan Data Penyusunan Basis Spasial Tahun 2017.....	67
Tabel 25.	Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Subdit/Subbag Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017.....	82
Tabel 26.	Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Sasaran Kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017.....	82
Tabel 27.	Serapan DIPA TA 2017 berdasarkan Sumber Dana.....	83
Tabel 28.	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran s.d Desember 2017.....	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.....	6
Gambar 2. Alokasi Anggaran Lingkup Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.....	7
Gambar 3. Mosaik Citra Landsat Tahun 2016.....	45
Gambar 4. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2015-2016.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber daya Hutan Tahun 2017

Lampiran 2. Rencana Kinerja Direktorat Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Presiden RI melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 menginstruksikan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sebagai wujud pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam mencapai misi dan tujuan organisasi maka Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017.

Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan hasil evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun berdasarkan Penetapan Kinerja (PK), yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan pada waktu yang akan datang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;

3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
6. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
7. pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan didukung oleh:

1. Subdirektorat Inventarisasi Hutan

Subdirektorat Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Inventarisasi Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi hutan tingkat wilayah;
4. supervisi atas urusan inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan di daerah; dan

5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Subdirektorat Inventarisasi Hutan terdiri atas:

a) Seksi Inventarisasi Nasional

Seksi Inventarisasi Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional.

b) Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan

Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

2. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan sumber daya hutan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemantauan sumber daya hutan;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan sumber daya hutan;
4. supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan sumber daya hutan.

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

a) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional

Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah.

b) Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan

Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.

3. Subdirektorat Pemetaan Dan Dokumentasi Tematik Kehutanan

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; dan
5. supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan di daerah.

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan terdiri atas:

a) Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan

Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan tematik kehutanan.

b) Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan

Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang dokumentasi tematik kehutanan.

4. Subdirektorat Jaringan Data Spasial

Subdirektorat Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang jaringan data spasial kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Jaringan Data Spasial menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan data spasial kehutanan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan jaringan data spasial kehutanan;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaringan data spasial kehutanan;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis jaringan data spasial kehutanan; dan
5. supervisi atas pelaksanaan urusan jaringan data spasial kehutanan di daerah.

Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan terdiri atas:

a) Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial;

Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan basis data spasial kehutanan.

b) Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial

Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

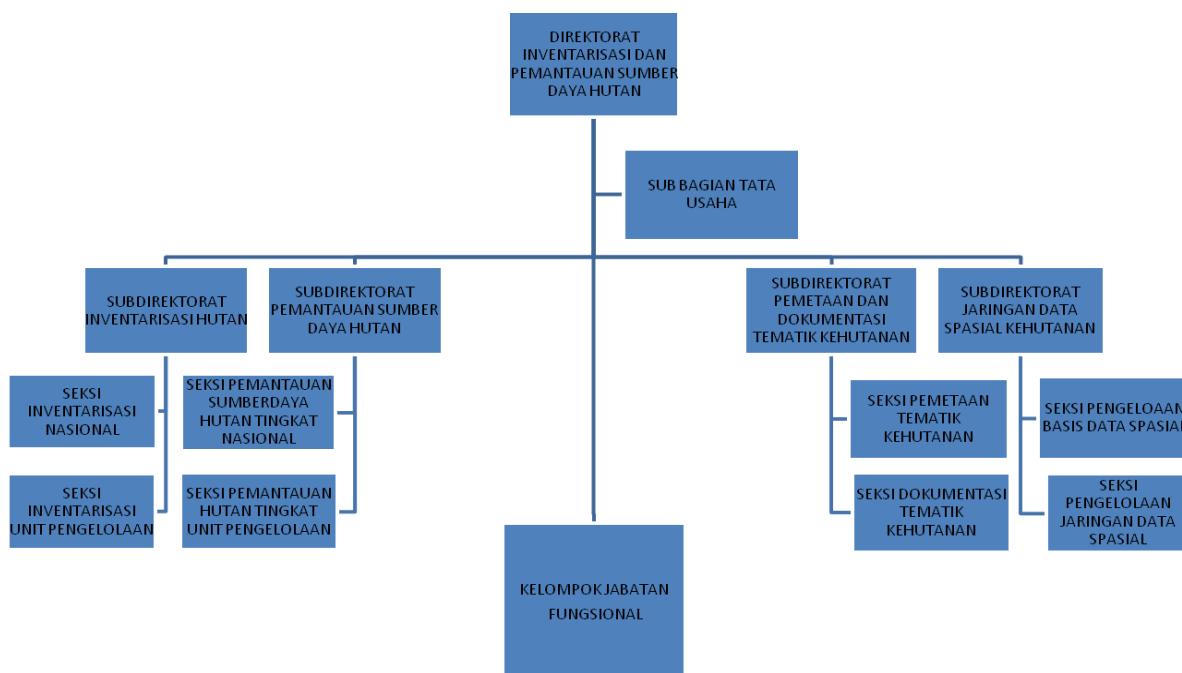
bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan jaringan data spasial kehutanan.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi Hutan.

Struktur organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan



D. Aspek Penunjang

a. Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2017 jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebesar Rp 4.789.033.000,- (*Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 terdiri atas dana Rupiah Murni (RM) dan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembagian dana tersebut sebagai berikut:

- Dana Rupiah Murni : Rp 3.293.348.000,-
- Dana PNBP : Rp 1.495.685.000,-

Total Anggaran : Rp 4.789.033.000,-

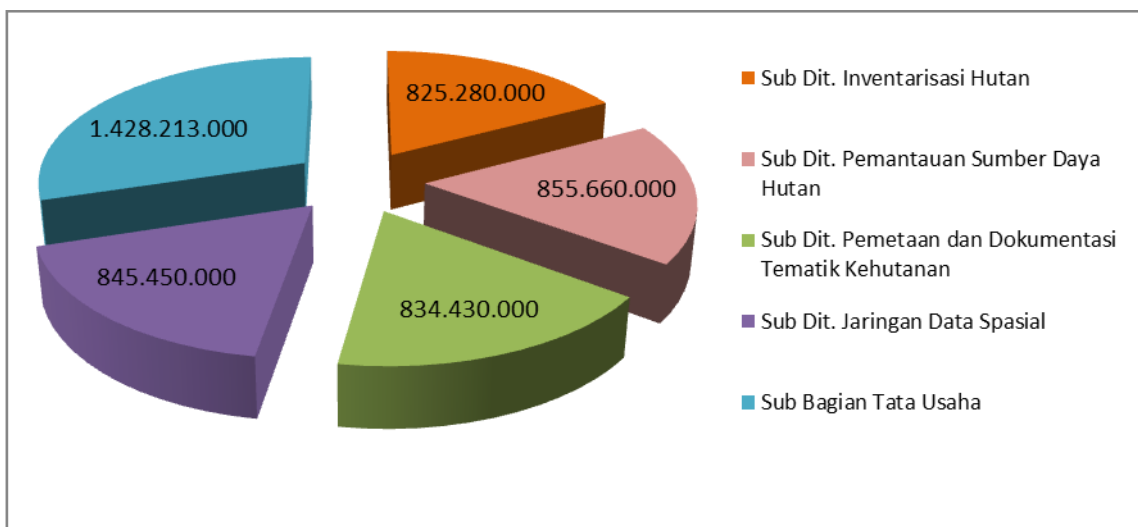
Anggaran pada Direktorat IPSDH tersebut dialokasikan untuk :

- Sub Direktorat Inventarisasi Hutan : Rp 825.280.000,-
- Sub Direktorat Pemantauan SDH : Rp 855.660.000,-
- Sub Direktorat Pemetaan dan DTK : Rp 834.430.000,-
- Sub Direktorat Jaringan Data Spasial : Rp 845.450.000,-
- Sub Bagian Tata Usaha : Rp 1.425.213.000,-

Total Anggaran : Rp 4.789.033.000,-

Jumlah anggaran yang diterima oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN No. DIPA-029.06.1.466100/2017 tanggal 7 Desember 2016 Rekapitulasi alokasi anggaran yang diterima oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017, tertuang pada diagram berikut:

Gambar 2. Alokasi Anggaran Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan TA 2017



b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah 73 orang, diklasifikasi berdasarkan golongan dan pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel 1 dan 2 berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Ket.
		Tahun 2016	Tahun 2017	
1	Golongan IV	9	10	
2	Golongan III	49	44	
3	Golongan II	11	8	
4	Golongan I	-	-	
5	Tenaga Upah	8	11	
	JUMLAH	77	73	

Ket: Terdapat 1(satu) orang pegawai yang diperbantukan di daerah.

Tabel 2. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan (Org)						JMLH (Org)
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP/SD	
1	Direktur	1						1
2	Subdirektorat Inventarisasi Hutan		5	1		3		9
3	Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	3	6		3		13
4	Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan		4	1		4		9
5	Subdirektorat Jaringan Data Spasial	2	3	4		3		12

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan (Org)						JMLH (Org)
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP/SD	
6	Subbagian Tata Usaha			2		3	1	6
7	Pejabat fungsional		2	5	4	1		12
8	Tenaga Upah			7	1	3		11
	Jumlah	4	17	26	5	20	1	73

Ket: Terdapat 1(satu) orang pegawai yang diperbantukan di daerah.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang yang dimiliki oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan untuk mendukung pembangunan dibidang planologi kehutanan tahun 2017 (bergerak dan tidak bergerak) senilai Rp36.024.461.054,- (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Empat Rupiah) rincian asset seperti tercantum pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017

PERKIRAAN NERACA / KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
KODE	URAIAN		JUMLAH	NILAI (Rp.)
ASET LANCAR				
117111	Barang Konsumsi			8.955.000,00
ASET TETAP				
132111	Peralatan dan Mesin			15.788.410.089,00
135121	Aset Tetap Lainnya			31.849.862.878,00
ASET TAK BERWUJUD				
162151	Software			7.076.092.083,00
Jumlah				54.723.320.050,00
Akumulasi Penyusutan Aset				(18.698.858.996,00)
JUMLAH ASET				36.024.461.054,00

E. Pengertian

1. *Akuntabilitas* adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2. *Kinerja* adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
3. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)* adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
4. *Laporan Kinerja* adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, dan bermanfaat antara lain untuk :
 - a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
 - c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
 - d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
5. *Visi* adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.
6. *Misi* adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.
7. *Tujuan* adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

8. *Sasaran* adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. *Strategik* adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
10. *Kebijakan* adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan, pelaksanaan program/kegiatan.
11. *Program* adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, services pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

a. Sasaran dan Indikator Program

Sebagai salah satu unit kerja di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mengemban sasaran program berupa *Tersedianya data dan Informasi SDH* dengan indikator program yaitu : *Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi*. Pada hakikatnya Sistem data dan informasi sumber daya hutan yang kuat, akuntabel dan terbuka sampai dengan tingkat tapak (KPH) diharapkan dapat memberikan input (feeding) terhadap seluruh upaya preventif (pencegahan) maupun penanggulangan isu dan masalah dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan hutan.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya sasaran outcome kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan adalah data dan informasi sumberdaya hutan terbarukan di seluruh KPH dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa *Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, sebanyak 600 KPH*.

c. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja, yang diformalkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Di dalam dokumen Penetapan Kinerja terdapat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target yang ditetapkan oleh Instansi bersangkutan.

Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang ditanda tangani oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagaimana terlampir.

Tabel 4. Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan
2.	Data dan Informasi SDH Nasional	Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan nasional	34 Provinsi
3.	KPH yang Yang Telah Memiliki Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah KPH yang Yang Telah Memiliki Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100 KPH
4.	Data dan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	Tersedia Data dan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	34 Provinsi
5.	Pengadaan Perangkat Data dan Komunikasi	Perangkat Data dan Komunikasi	1 Layanan

Ket *) : Perjanjian Kinerja terdapat pada lampiran laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. *Metoda Pengukuran Kinerja*

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dilakukan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. *Pengukuran Kinerja*

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Hasil dari pengukuran kinerja, merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, yang berupa indikator-indikator masukan (input), keluaran (ouput), hasil (outcome).

Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung Persentase Capaian digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi-Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

2. *Evaluasi Kinerja*

Berdasarkan perhitungan formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dan sasaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka

pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase kinerja adalah :

85 % - 100 % = kinerja sangat baik;
70 % - < 85 % = kinerja baik;
55 % - < 70 % = kinerja cukup baik;
< 55 % = kinerja kurang baik

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2017, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan keluaran (output) yang ingin dicapai selama tahun 2017. Sesuai dengan Renstra Tahun 2015 - 2019, Renja Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2017 maka sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran dan kegiatan Direktorat Inventarisasi

dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2017 yang diukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran, Target dan Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Tahun 2017

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terbarukannya Data dan Informasi SDH Nasional dan seluruh KPH	1.1 Data dan Peta SDH Mendukung Pengalokasian KH untuk Perhutanan Sosial a Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional b Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	Nasional (34 Provinsi)	Nasional (34 Provinsi)	100
		1.2 Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH a Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH pada KPH	100 KPH	100 KPH	100
		1.3 Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	34 Provinsi	34 Provinsi	100

		<ul style="list-style-type: none"> a Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional b Penyelenggaraann Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional 			
Rata-rata Capaian Kinerja					100

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 sebanyak 1 (Satu) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 33 (Tiga Puluh Tiga) kegiatan rinci.

Tabel 6. Kegiatan Rinci Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Sasaran Unit Kegiatan	Target 2017	Elemen Kegiatan
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta SDH Mendukung Pengalokasian KH untuk Perhutanan Sosial	Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Nasional (34 Provinsi)	001 Penyusunan NSDH Nasional
				002 Penyusunan Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan
				003 Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional

				004	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi
				005	Uji Petik Inventarisasi Hutan Nasional
				006	Penghitungan Potensi SDH Nasional
				007	Pembuatan Peta NSDH
		Terselenggaranya Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	008	Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional
				009	Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional
				010	Kompilasi Hasil Update Data Penutupan Lahan Dalam Rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan
				011	Penelaahan Penutupan Lahan pada Areal IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi sedang/tinggi

				012 Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh
				013 Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan
				014 Pengecekan Lapangan Data Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat untuk Accuracy Assesment (4 Lokasi)
	Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH pada KPH	100 KPH	015 Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)
				016 Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH
	Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung	Terselenggaranya Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	017 Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia
				018 Penghitungan Deforestasi Indonesia

	Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)			019	Penelaahan Peta Tematik Kehutanan
				020	Dokumentasi Data dan Peta
				021	Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan
				022	Pemetaan Areal Indikatif Penundaaan Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
	Terselenggaranya Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional		34 Provinsi	023	Penyusunan Basis Data Spasial LHK
				024	Pengelolaan Jaringan Data Spasial LHK
				025	Penyempurnaan WEBGIS LHK
				026	Inhouse Training Pemotretan Udara
				027	Pengoperasian dan Pemeliharaan Microlight Trike
				028	Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Good Governance Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai sakip minimal 78	029	Pelayanan Operasional Perkantoran
		030	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
		031	Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan
		032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
		033	Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan

Form Rencana Kinerja Tahun 2017 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017 secara lengkap disampaikan pada lampiran 2.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melihat persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Hasil Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan 33 (Tiga Puluh Tiga) kegiatan rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Pokok Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Capaian Tahun 2017	
				Target	Realisasi (%)
Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Penyusunan NSDH Nasional	Buku NSDH Nasional	1 Buku	100%
		Penyusunan Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan	Konsep Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan	1 Laporan	100%
		Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional	Laporan Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional	1 Laporan	100%
		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi	1 Laporan	100%
		Uji Petik Inventarisasi Hutan Nasional	Laporan Uji Petik Inventarisasi Hutan Nasional	1 Laporan	100%
		Penghitungan Potensi SDH Nasional	Data Potensi SDH Nasional	1 Dokumen	100%
		Pembuatan Peta NSDH	Dokumen Peta NSDH	1 Dokumen	100%

Terselenggara nya Pemantauan SDH Nasional	Hasil/ Pelaksanaan Pemantauan SDH Nasional	Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional	Laporan Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional	1 Laporan	100%
		Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	Laporan Penutupan Lahan Tingkat Nasional	1 Buku	100%
		Kompilasi Hasil Update Data Penutupan Lahan Dalam Rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan Hasil Update Data Penutupan Lahan Dalam Rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Laporan	100%
		Penelaahan Penutupan Lahan pada Areal IUPHHK- HA/HT dengan Citra Resolusi sedang/tinggi	Laporan Penutupan Lahan pada Areal IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi sedang/tinggi	1 Laporan	100%
		Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh	Laporan Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh	1 Dokumen	100%
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Laporan	100%

		Pengecekan Lapangan Data Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat untuk Accuracy Assesment (4 Lokasi)	Laporan Pengecekan Lapangan Data Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat untuk Accuracy Assesment (4 Lokasi)	1 Judul	100%
Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH pada KPH	Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)	Laporan Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)	1 Laporan	100%
		Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH	Laporan Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH	1 Laporan	100%
Terselenggara nya Pemetaan SDH Nasional	Hasil/Pelaksanaan Pemetaan SDH Nasional	Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	Laporan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	1 Judul	100%
		Penghitungan Deforestasi Indonesia	Laporan Deforestasi Indonesia	1 Judul	100%
		Penelaahan Peta Tematik Kehutanan	Laporan Hasil Telaah Peta Tematik Kehutanan	1 Judul	100%
		Dokumentasi Data dan Peta	Laporan Dokumentasi Data dan Peta	1 Judul	100%

		Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan	Laporan Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan	1 Judul	100%
		Pemetaan Areal Indikatif Penundaaan Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Dokumen Pemetaan Areal Indikatif Penundaaan Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 Dokumen	100%
Terselenggara nya Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Penyusunan Basis Data Spasial LHK	Laporan Penyusunan Basis Data Spasial LHK	1 Dokumen	100%
		Pengelolaan Jaringan Data Spasial LHK	Laporan Pengelolaan Jaringan Data Spasial LHK	1 Dokumen	100%
		Penyempurnaan WEBGIS LHK	Laporan Penyempurnaan WEBGIS LHK	1 Laporan	100%
		Inhouse Training Pemotretan Udara	Laporan Inhouse Training Pemotretan Udara	1 Laporan	100%
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Microlight Trike	Laporan Pengoperasian dan Pemeliharaan Microlight Trike	1 Laporan	100%
		Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Laporan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	1 Laporan	100%

Good Governance Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Pelayanan Operasional Perkantoran	Dokumen Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen / 12 Bulan Layanan	100%
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Dokumen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5 Dokumen	100%
	Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	1 Dokumen	100%
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Laporan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1 Dokumen	100%
	Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Laporan Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	1 Dokumen	100%
	<i>Rata-rata pencapaian kinerja kegiatan rinci</i>			

2. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja sasaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Terbaruannya Data dan Informasi SDH Nasional dan seluruh KPH	Data dan Peta SDH Mendukung Pengalokasian KH untuk Perhutanan Sosial	Nasional (34 Provinsi)	Nasional (34 Provinsi)	100
	Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	100 KPH	100 KPH	100
	Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	34 Provinsi	34 Provinsi	100
<i>Rata-rata pencapaian Sasaran Kegiatan</i>				100

3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017 adalah sebesar 100%.

Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan rinci (33 kegiatan) tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan telah dilakukan secara efektif karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Uraian Indikator Kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Data dan Peta SDH Mendukung Pengalokasian KH untuk Perhutanan Sosial

Indikator kinerja kegiatan ini mencakup dua komponen yaitu komponen penyediaan data dan informasi potensi SDH nasional yang menjadi tanggung jawab Subdit Inventarisasi Hutan serta komponen penyelenggaraan pemantauan SDH nasional yang menjadi tanggung jawab Subdit Pemantauan Sumber Daya Hutan.

1.1 Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Nasional

Penyediaan data dan informasi potensi sumber daya hutan nasional dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu (1) Penyusunan NSDH Nasional; (2) Penyusunan Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan; (3) Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional; (4) Monitoring dan evaluasi NSDH provinsi; (5) Uji Petik Inventarisasi Hutan Nasional; (6) Penghitungan Potensi SDH Nasional; (7) Pembuatan Peta NSDH.

1.1.1 Penyusunan NSDH Nasional

NSDH Nasional disusun setiap tahun. Pada tahun 2017 disusun NSDH tahun 2016. Luas kawasan hutan yang digunakan dalam penyusunan NSDH Nasional adalah luas kawasan hutan daratan.

Saldo awal NSDH tahun 2016 untuk luas kawasan hutan sebesar 119.961.468,21 ha, selama tahun 2016 terjadi pengurangan sebesar 333.230,35 ha sehingga pada akhir tahun 2016 (saldo akhir) luas kawasan hutan sebesar 119.629.059,85 ha.

1.1.2 Penyusunan Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan

Pada tahun 2017, Subdit Inventarisasi Hutan menyusun konsep Pedoman NSDH dan konsep Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan Nasio. Kedua konsep peraturan tersebut masih perlu pembahasan lebih lanjut untuk disahkan dan mempunyai ketetapan hukum.

1.1.3 Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional

Kegiatan Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan dan hasil inventarisasi hutan nasional sehingga pelaksanaan inventarisasi hutan nasional sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 kegiatan pengendalian teknis inventarisasi hutan nasional dilaksanakan di empat BPKH yaitu:

1. BPKH Wilayah IX Ambon
2. BPKH Wilayah XXII Kendari
3. BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang
4. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru

1.1.4 Monitoring dan Evaluasi NSDH Provinsi

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi ini dilaksanakan di :

1. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
3. Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 tidak tersedia dana dekonsentrasi untuk penyusunan NSDH Provinsi, sehingga tidak semua provinsi menyusun NSDH termasuk provinsi-provinsi yang dikunjungi yaitu Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Papua. Beberapa provinsi menyusun dengan menggunakan dana APBD yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.1.5 *Uji Petik Inventarisasi Hutan Nasional*

Kegiatan Uji Petik Inventarisasi Hutan Nasional ini dilaksanakan di wilayah kerja:

1. BPKH Wilayah II Palembang
2. BPKH Wilayah III Pontianak
3. BPKH Wilayah V Banjar Baru
4. BPKH Wilayah VII Makasar
5. BPKH Wilayah XI Jawa-Madura
6. BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang
7. BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang
8. BPKH Wilayah XIV Kupang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunjungi lokasi plot klaster yang sudah dilakukan enumerasi atau reenumerasi dan memantau hasil pelaksanaan kegiatan lapangan. Berdasarkan kegiatan uji petik diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Semua lokasi klaster yang dikunjungi dapat ditemukan titik pusatnya, Pencatatan tanda-tanda pusat klaster dan koordinat lokasi sudah benar sehingga dapat dilacak kembali.
2. Penomoran pohon dan pencatatan dimensi pohon sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Terdapat beberapa perbedaan ukuran dimensi, namun bisa diabaikan mengingat adanya perbedaan waktu pengukuran.

1.1.6 *Penghitungan potensi SDH Nasional*

Penghitungan potensi sumberdaya hutan Indonesia dihitung berdasarkan data plot klaster TSP/PSP. Pada tahun 2017 juga disusun Program Penyajian Data NFI untuk memudahkan entri data dan menyajikan potensi hutan dari data TSP/PSP.

1.1.7 *Pembuatan Peta NSDH*

Peta NSDH menjadi salah satu target rencana aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) sesuai Perpres No. 9 tahun 2016 sehingga penyelesaian Peta NSDH dimonitor oleh Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai Ketua Tim Percepatan KSP. Peta NSDH yang disusun

adalah Peta NSDH tahun 2016. Peta ini mencakup dua tema, yaitu Peta NSDH Perubahan Kawasan Hutan dan Peta NDSH Perubahan Penutupan Lahan.

1.1.8 *Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Di KPH*

Kegiatan Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan di KPH dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil inventarisasi hutan di wilayah KPH, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar mengacu pada petunjuk teknis sesuai Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1/2017 tentang tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan Dan Sosial Budaya Masyarakat Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Kegiatan Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan di KPH untuk tahun 2017 dilaksanakan di :

1. BPKH Wilayah XIV Kupang
2. BPKH Wilayah XVIII Aceh
3. BPKH Wilayah XX Lampung
4. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya

1.2 Penyelenggaraan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional

Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan yang merupakan salah satu unit kerja yang menyediakan data pemantauan sumber daya hutan dengan teknologi penginderaan jauh, yaitu data penutupan lahan nasional. Pada tahun 2017, Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan akan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : (1) Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional yang dimaksud untuk melakukan kegiatan evaluasi teknis pada daerah yang dianggap desforestasinya bermasalah, (2) Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional (3) Kompilasi Hasil Update Data Penutupan Lahan dalam rangka Pemantauan Sumberdaya Hutan (4) Melakukan penelaahan terhadap penutupan lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan citra resolusi sedang; (5) Pengelolaan basis data citra penginderaan jauh yang dimaksudkan untuk menyimpan dan menyusun katalog citra serta mengelola citra penginderaan jauh berbagai resolusi (spasial, spektral dan temporal). Kegiatan ini juga memerlukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan data citra penginderaan jauh seperti LAPAN dan BIG; (6) Penerapan sistem manajemen mutu (ISO) dalam standarisasi pemetaan penutupan lahan pada Areal Unit IUPHHK-HA/HT; Pengelolaan basis data citra penginderaan jauh yang dimaksudkan untuk menyimpan dan menyusun katalog citra serta mengelola citra penginderaan jauh berbagai resolusi (spasial, spektral

dan temporal). Kegiatan ini juga memerlukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan data citra penginderaan jauh seperti LAPAN dan BIG; (7) Pengecekan lapangan dalam rangka mendukung kegiatan pemantauan sumber daya hutan dengan menggunakan data dan teknologi penginderaan jauh.

1.2.1 Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional

Kegiatan Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional meliputi:

- Kegiatan ini dilakukan pada beberapa BPKH yang dianggap terdapat masalah dalam melakukan Penafsiran dan dianggap tidak wajar.
- BPKH yang dilakukan kegiatan Evaluasi Teknis yaitu BPKH I Medan, BPKH V Banjarbaru, BPKH XI Jawa-Madura, BPKH VIII Denpasar, BPKH XIII Pangkalpinang, BPKH XVI Palu dan BPKH XXI Palangkaraya

1.2.2 Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional

Kegiatan Update data Penutupan Lahan Tingkat Nasional meliputi:

Update data penutupan lahan tahunan, yang terdiri atas :

- a) Penyediaan bahan untuk keperluan update data penutupan lahan;
- b) Pembahasan awal untuk persiapan update data penutupan lahan;
- c) Pembahasan update data penutupan lahan;
- d) Pembahasan hasil update data penutupan hutan;
- e) Penggandaan laporan hasil update data penutupan lahan

Kegiatan Supervisi dilakukan di 10 Lokasi yaitu BPKH Aceh, BPKH Kepri, BPKH Lampung, BPKH Kalbar, BPKH Kalsel, BPKH Makasar, BPKH Palu, BPKH Manado, BPKH kendari, BPKH Jayapura

1.2.3 Kompilasi Penutupan Lahan Indonesia

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- Mendapatkan informasi/data penutupan lahan terbaru melalui kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang yang sudah dilakukan oleh BPKH.
- Membahas hasil penafsiran yang telah dilakukan oleh BPKH bersama dengan instansi terkait.
- Melakukan revisi/perbaikan hasil penafsiran
- Menggabungkan/mengintegrasikan hasil penafsiran menjadi satu hasil penafsiran seluruh Indonesia.

Hasil kegiatan workshop kompilasi penutupan lahan Indonesia adalah data spasial hasil penafsiran citra dan peta Penutupan Lahan Indonesia tahun 2017 yang dilakukan oleh BPKH.

1.2.4 Telaah Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada berbagai pihak baik yang berkaitan dengan rencana pengelolaan izin pemafaatan, penggunaan dan perubahan peruntukan kawasan hutan, agar peta yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan sesuai dengan kondisi penutupan lahan terbaru dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Untuk menyimpan dan mengelola data hasil telaah, perlu dilakukan pengarsipan/penataan data hasil telaah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil kegiatan berupa data areal IUPHHK-HA/HT yang ditinjau dari IUPHHK-HA/HT dengan citra resolusi sedang untuk periode tahun 2015 dan tahun 2017, rekapitulasi IUPHHK-HA/HT adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Persiapan/Pemilihan Areal IUPHHK-HA/HT dengan citra resolusi sedang Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Nomor SK/ Tanggal	Luas (ha)
1	PT Yotefa Sarana Timber	SK570/Menhut-II/2011 3 Oktober 2011	123.565,00
2	PT Erythrina Nugramegah	SK.58/Menhut-II/2014 20 Januari 2014	41.751,88
3	PT Central Kalimantan Abadi	SK.60/Menhut-II/2014 20 Januari 2014	39.793,01
4	PT Carus Indonesia	94/Kpts-II/2000 22 Desember 2000	72.170,00
5	PT Inhutani I (Unit Meraang)	561/Menhut-II/2006 29 Desember 2006	70.700,00
6	PT Wono Indo Niaga	SK.740/Menhut-II/2014 02 September 2014	12.660,00
7	PT Bina Silva Nusa	SK.473/Menhut-II/2012 31 Agustus 2012	9.270,00

No	Nama Perusahaan	Nomor SK/ Tanggal	Luas (ha)
8	PT Silva Rimba Lestari	SK.165/Menhut-II/2011 04 April 2011	88.000,00
9	PT. HUTAN SIBAU PERSADA	SK.168/Kpts-II/2012 03 April 2012	71.870,00
10	PT KARUNIA HUTAN LESTARI	SK.315/Menhut-II/2009 29 Mei 2009	40.238,00
11	PT Bangun Kayu Irian	SK.623/Menhut-II/2014 14 Juli 2014	140.045,00
12	PT TIMBERDANA	SK.186/Menhut-II/2014 24 Februari 2014	72.330,00
13	PT Sukses Jaya Wood	SK.76/Menhut-II/2014 19 September 2014	1.583,90
14	PT Kesatuan Mas Abadi	SK.818/Menhut-II/2014 25 September 2014	99.890,00
15	PT Sinar Ceria Sejati	SK.754/Menhut-II/2014 17/09/2014	10.885,00
16	PT Ekosistem Khatulistiwa Lestari	560/Menhut-II/2011 30 September 2011	14.080,00
17	PT Hutani Kalimantan Abadi Permai	323/Menhut-II/2009 29 Mei 2009	35.400,00
18	PT Borneo Karunia Mandiri	1002 Tahun 2001 31 Desember 2001	12.000,00
19	PT Setyasena Indratama	81/Kpts-II/1997 06 Februari 1997	67.820,00
20	PT Sulwood Export Development Ltd.	220/Kpts-II/1998 27 Februari 1998	54.980,00
21	Koperasi Wailo Wana Lestari	522,11-53 Tahun 2001 08 Juni 2001	29.955,00
22	PT Surya Kirana Dutamas	670/Menhut-II/2009 15 Oktober 2009	66.230,00
23	PT Semarak Dharma Timber	287/Menhut-II/2014 20 Maret 2014	164.180,00
24	PT Bintuni Utama Murni Wood Industries	213/Menhut-II/2007 28 Mei 2007	82.120,00
25	PT Fajar Surya Swadaya	428/Menhut-II/2012 07 Agustus 2012	61.470,00

No	Nama Perusahaan	Nomor SK/ Tanggal	Luas (ha)
26	PT Multikarya Lisun Prima	347/Menhut-II/2011 03 Juni 2011	28.885,00
27	PT Panei Lika Sejahtera	197/Menhut-II/2006 01 Juni 2006	12.460,00
28	PT Duadja Coorporation II	90/Kpts-II/2001 15 Maret 2001	74.860,00
29	PT Sinergi Bumi Lestari	559/Menhut-II/2006 29 Desember 2006	12.770,00
30	PT Hasnur Jaya Utama	28/Kpts-II/2001 09 Februari 2001	38.445,00
31	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam	112/Kpts-2/2000 29 Desember 2000	21.690,00
32	PT Belantara Pusaka	20/Kpts-II/1998 07 Januari 1998	15.610,00
33	PT ITCI Kartika Utama	160/Menhut-II/2012 27 Maret 2012	173.395,00
34	PT Bukit Beringin Makmur	308/Menhut-II/2011 09 Juni 2011	46.170,00
35	PT Hutan Berau Lestari	777/Menhut-II/2014 19 September 2014	12.002,00
36	PT Inhutani II Tanah Grogot	504/Menhut-II/2009 03 September 2009	16.816,00
37	PT Inhutani II (Unit Pulau Laut)	30/Menhut-II/2006 13 Februari 2006	48.720,00
38	PT Selaras Inti Semesta	18/Menhut-II/2009 22 Januari 2009	169.400,00
39	PT Wana Mukti Lestari	SK.401/Menhut-II/2012 8 Januari 2012	46.235,00
40	PT Swaka Lahan Sentosa	SK.236/Menhut-II/2007 4 Juli 2007	32.180,00
41	PT Rimba Karya Rayatama	SK.186/Menhut-II/2006 19 April 2006	40.630,00
42	PT Harapan Kaltim Lestari	SK.187/Menhut-II/2006 19 Mei 2006	44.430,00
43	PT Daisy Timber	SK.928/Menhut-II/2013 17 Desember 2013	30.170,00

No	Nama Perusahaan	Nomor SK/ Tanggal	Luas (ha)
44	PT Gunung Gajah Abadi	SK469/Menhut-II/2012 29 Agustus 2012	74.980,00
45	PT Rimba Karya Rayatama	SK.384/Menhut-II/2009 2 Juli 2009	143.970,00
46	PT Bina Balantak Utama	SK.365/Menhut-II/2011 7 Juli 2011	298.710,00
47	PT Mutiara Alas Khatulistiwa	SK676/Menhut-II/2014 12 Agustus 2014	81.855,00
48	PT Gunung Meranti	SK.941/Menhut-II/1999 14 Oktober 1999	95.265,00
49	PT Manoreh Loggingindo	SK.516/Menhut-II/2005 28 Desember 2005	57.830,00
50	PT Samudera Rejeki Perkasa	SK819/Menhut-II/2014 25 September 2014	89.190,00
51	PT Dwima Jaya Utama	SK.267/Menhut-II/2004 21 Juli 2004	127.300,00
52	PT Pemantang Abaditama	942/Kpts-VI/1999 14 Oktober 1999	49.370,00
53	PT Wana Dipa Perkasa	SK.484/Menhut-II/2014 16 Mei 2014	8.355,00
54	PT Mitra Kembang Selaras	SK.71/Menhut-II/2007 23 Februari 2007	14.800,00
55	PT Rimba Raya Lestari	SK.300/Menhut-II/2007 03 September 2007	17.330,00
56	PT Hutan Mahligai	SK.47/Menhut-II/2006 06 Maret 2006	11.275,00
57	PT Nusantara Alam Raya Sejahtera	SK.693/Menhut-II/2014 15 Agustus 2014	133.040,00
58	PT Roda Mas Timber Kalimantan	SK.59/Menhut-II/2014 20 Januari 2014	69.620,00
59	PT Hanurata	SK.859/Menhut-II/2014 29 Januari 2014	234.470,00
60	PT Citra Niaga Nusantara	SK.418/Menhut-II/2014 24 April 2014	46.065,00
61	PT Diamond Raya Timber	443/Kpts-II/1998 08 Mei 1998	90.956,24

No	Nama Perusahaan	Nomor SK/ Tanggal	Luas (ha)
62	PT Kayu Waja	81/Kpts-II/2000 22 Desember 2000	38.450,00
63	PT Sindo Lumber	297/Menhut-II/2010 05 Mei 2010	36.215,00
64	PT Mutiara Kalja Permai Unit I	553/Menhut-II/2013 02 Agustus 2013	75.120,00
65	PT Aditya Kirana Mandiri	862/Kpts-VI/1999 12 Oktober 1999	42.700,00
66	PT Wana Bakti Persada Utama	864/Kpts-VI/1999 13 Oktober 1999	44.402,00
67	PT Nadila Indodaya	503/Menhut-II/2006 06 Nopember 2006	44.090,00
68	PT Kedap Sayaag	292/Menhut-II/2008 28 Agustus 2008	18.000,00
69	PT Kemakmuran Berkah Timber	199/Menhut-II/2014 27 Februari 2014	82.194,45
70	Koperasi Unit Desa Beringin Mulya	845/Kpts-II/1999 07 Oktober 1999	23.635,00
71	PT Karya Wijaya Sukses	192/Menhut-II/2006 24 Mei 2006	22.320,00
72	PT Inhutani II Unit Sei Tubu	1/1/IUPHHK- HA/PMDN/2015 13 Februari 2015	91.510,00
73	PT Sarana Tri Rasa Bhakti	523/Menhut-II/2009 24 Mei 2006	35.090,00
74	PT Karyarekanaan Bina bersama	263/Menhut-II/2004 21 Juli 2004	43.810,00
75	PT Daha Tama Adikarya	465/Kpts-II/1995 04 September 1995	64.620,00
76	PT Satyaguna Sulajaya	333/Menhut-II/2004 31 Agustus 2004	27.740,00
77	PT Sulwood Export Development Ltd.	220/Kpts-II/1998 27 Februari 1998	54.980,00
78	PT Irma Sulindo	04/Kpts-II/2001 11 Januari 2001	174.540,00
79	PT Multi Wahana Wijaya	159/Menhut-II/2011	107.740,00

No	Nama Perusahaan	Nomor SK/ Tanggal	Luas (ha)
		31 Maret 2011	
80	PT Tanjung Redeb Hutani	329/Menhut-II/2011 22 Juni 2011	187.920,00
81	PT Borneo Karya Indah Mandiri	SK.474/Menhut-II/2006 5 Oktober 2006	50.860,00
82	PT Karda Trader LTD	76/Kpts-II/2000 22 Desember 2000	98.400,00
83	PT Hutanindo Lestari Raya Timber	15/Kpts-II/2001 26 Januari 2001	98.000,00
84	PT Karya Jaya Berdikari	SK.117/Menhut-II/2009 19 Maret 2009	93.980,00
85	PT Gambaru Selaras Alam	SK.379/Menhut-II/2014 02 September 2014	20.445,00
86	PT Samhutani	SK.751/Menhut-II/2014 16 September 2014	30.311,78
87	PT Oceanias Timber Products	SK.298/Menhut-II/2012 14 Juni 2012	16.600,00
88	PT SENTOSA BAHAGIA BERSAMA	SK.249/Menhut-II/2009 24 April 2009	55.055,00
89	PT Ratah Timber	SK.359/Menhut-II/2009 .18/06/2009	93.425,00
90	PT Greaty Sukses Abadi	SK.634/Menhut-II/2009 07 Oktober 2009	16.865,00
91	PT Inhutani Unit Labanan	SK.484/Menhut-II/2006 19 Oktober 2006	138.210,00
92	PD PANCA KARYA	117/Kpts-II/2000 29 Desember 2000	63.440,00
93	CV PANGKAR BEGILI	SK.395/Menhut-II/2007 27 Nopember 2007	30.195,00
94	PT AUSTRAL BYNA	SK.395/Menhut-II/2007 27 Nopember 2007	255.569,64
95	PT Wana Perintis	SK.781/Kpts-II/1996 18 Desember 1996	6.900,00
96	PT Wapoga Mutiara Timber Unit II	SK625/Menhut-II/2012 7 Nopember 2012	169.170,00
97	PT Riu Mamba Karya Sentosa	SK.40/Menhut-II/2006	34.610,00

No	Nama Perusahaan	Nomor SK/ Tanggal	Luas (ha)
		23 Februari 2006	
98	PT Kahayan Terang Abadi	3/1/IUPHHK- PB/PBDN/2015 5 Juni 2015	50.000,00
99	PT Gunung Raya Utama Timber Industries	SK.32/Menhut-II/2007 22 Januari 2007	116.920,00
100	PT Kandelia Alam	SK.249/Menhut-II/2008 24 Juni 2008	18.130,00
101	PT Cahaya Karya Dayaindo	SK.26/Menhut-II/2012 26 Januari 2012	35.240,00
102	PT Barito Nusantara Indah	SK.105/Menhut-II/2005 25 April 2005	94.685,00
103	PT Wana Hijau Pesaguan	SK.719/Menhut-II/2009 19 Oktober 2009	104.975,00
104	PT Itci Kayan Hutani	SK.160/Menhut-ii/2005 07 Juni 2005	218.375,00
105	PT Intraca Wood Manufacturing	SK.103/Menhut-II/2010 5 Maret 2010	199.570,71
106	PT Inhutani I Unit Sambarata	SK.195/Menhut-II/2006 01 Juni 2006	106.020,00
107	PT Panambangan	SK.411/Menhut-II/2004 18 Oktober 2004	43.240,00
108	PT Rizki Kacida Reana	SK.703/Menhut-II/2010 20 Desember 2010	29.344,85
109	PT Mardhika Insan Mulia	1003/Kpts-VI/1999 10 Oktober 1999	46.080,00
110	PT Mardhika Insan Mulia	SK.240/Menhut-II/2008 11 Juni 2008	25.630,00
111	PT Balikpapan Wana Lestari	SK. 179/Menhut-II/2014 20 Februari 2014	140.845,00
112	PT Rizki Kacida Reana	SK. 60/Menhut-II/2009 16 Februari 2009	55.150,00
113	PT Aya Yayang Indonesia	840/Kpts-II/1999 6 Oktober 1999	87.241,00
114	PT Teluk Nauli	SK.218/Menhut-II/2010 06 April 2010	83.143,00

No	Nama Perusahaan	Nomor SK/ Tanggal	Luas (ha)
115	PT Pesona Belantara Persada	SK.574/Menhut-II/2010 8 Desember 2010	21.315,00
116	PT Sari Bumi Kusuma	58/Menhut-II/2007 22 Februari 2007	75.200,00
117	PT Meranti Mustika	SK.1001/Kpts-II/1999 14 Oktober 1999	45.530,00
118	PT Joloy Mosak	SK.227/Menhut-II/2011 18 April 2011	15.575,00
119	PT Rinanda Inti Lestari	103/Kpts-II/2001 15 Maret 2001	30.160,00
120	PT Huma Sulut Lestari	39/Kpts-II/2001 12 Februari 2001	26.800,00

1.2.5 *Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh*

Kegiatan pengelolaan basis data citra penginderaan jauh meliputi:

- a. Koordinasi dengan LAPAN dan BIG untuk pengadaan dan koreksi data citra satelit penginderaan jauh ;
- b. Pembangunan katalog citra yaitu pengembangan Aplikasi untuk katalog Citra Penginderaan Jauh. Untuk kegiatan pembangunan katalog citra dilakukan dengan menggunakan jasa konsultansi.

1.2.6 *Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemantauan*

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan secara prima kepada publik terkait Prosedur Pemeriksaan Penafsiran Citra Satelit Untuk Ijin Pemanfaatan. Dalam rangka mempertahankan sertifikat ISO tersebut,

Pelaksanaan kegiatan surveillance ISO 9001:2008 tahun 2017 dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Hasil kegiatan surveillance dilaporkan secara tertulis dan harus ditindaklanjuti melalui kegiatan perbaikan/koreksi. Hasil surveillance yang telah dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi IAPMO secara detail dapat dilihat pada laporan kegiatan.

1.2.7 *Pengecekan Lapangan Data Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat untuk accuracy assesment (3 Lokasi)*

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data penutupan lahan tingkat nasional dan perubahannya. Kegiatan pengecekan lapangan dengan hasil update data penutupan lahan dilakukan di 3 Lokasi dengan 6 regu yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 10. Capaian Dari Indikator Kinerja Kegiatan Data dan Peta SDH Mendukung Pengalokasian KH untuk Perhutanan Sosial Tahun 2017

No.	Komponen (Unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	34 Provinsi	34 Provinsi	100
2	Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	Terselenggaranya Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	34 Provinsi	100
Rata-rata pencapaian kinerja sasaran					100

2. Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH

2.1 Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH pada KPH

Buku Data dan Informasi Potensi KPH Tahun 2017 disusun berdasarkan target Renstra Direktorat Jenderal Planologi Hutan dan Tata Lingkungan dan Renja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Data dan Informasi Potensi yang disusun untuk tahun 2017 terdiri dari 100 KPH dengan rincian 82 KPHK, 10 KPHL dan 8 KPHP yang meliputi gambaran umum KPH, wilayah pengelolaan dan potensi dari KPH. Mengingat kegiatan fasilitasi KPH baru dilaksanakan pada sebagian KPH, maka kelengkapan dan kedetailan data dan informasi potensi KPH yang disajikan dalam Buku Data dan Informasi Potensi KPH Tahun 2017 juga bervariasi. Data dan informasi tersebut akan diperbaharui setiap tahun sesuai perkembangan ketersediaan data.

Rincian Penyusunan Buku Data dan Informasi Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11. Rincian Penyusunan Buku Data dan Informasi Tahun 2017

No.	Provinsi	Lokasi/Kabupaten	Unit	
1	ACEH	Aceh Tengah dan Aceh Timur	KPHK LINGGA ISAQ	
2		Kota Sabang	KPHK PULAU WEH	
3		Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Kota Subulussalam	KPHK RAWA SINGKIL	
4	SUMUT	Padang Lawasa, Padang Lawas Utara, Mandaling Natal dan Tapanuli Selatan	KPHK BARUMUN	
5		Asahan, Labuhan Batu Utara, dan Toba Samosir,	KPHK DOLOK SURUNGAN	
6		Simalungun	KPHK DOLOK TINGGI RAJA	
7		Labuhan Batu Selatan	KPHK HOLIDAY RESORT	
8		Deli Serdang dan Langkat	KARANG GADING	
9		Deli Serdang dan Karo	KPHK SIBOLANGIT	
10		Pakpak	KPHK SICIKE-CIKE	
11		Humbang Hasundutan dan Toba Samosir	KPHK SIJABA HUTANGINJANG	
12		Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan	KPHK SIPIROK	
13		Nias Selatan	KPHK TAMAN BURU PULAU PINI	
14		Asahan	KPHL UNIT XIII	
15		Mandalin Natal	KPHL UNIT XXX	
16		Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli	KPHL UNIT XXXII	
17		SUMBAR	Tanah Datar, Padang Pariaman, Solok, Pesisir Selatan dan Kota Padang	KPHK ARAU HILIR
18		RIAU	Kampar dan Kuantan Singingi	KPHK BUKIT RIMBANG BUKIT BALING
19			Bengkalis dan Siak	KPHK GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU
20	Pelalawan dan Indragiri Hulu		KPHK KERUMUTAN	
21	JAMBI	Sorolangun dan Batang Hari	KPHK DURIAN LUNCUK	
22	SUMSEL	Musi Banyuasin dan Banyuasin	KPHK DANGU BENTAYAN	
23		Banyuasin dan Ogan Komering Ilir	KPHK PADANG SUGIHAN	

24	BENGKULU	Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Rejang Lebong	KPHK BUKIT KABA
25		Bengkulu Utara	KPHK ENGGANO
26	LAMPUNG	Lampung Selatan	KPHK KEPULAUAN KRAKATAU
27	JAKARTA	Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Utara	KPHK JAKARTA
28	JABAR	Purwakarta, Subang dan Bandung Barat	KPHK BURARANG TANGKUBAN PERAHU
29		Bandung dan Garut	KPHK GUNTUR PAPANDAYAN
30		Bandung, Garut dan Cianjur	KPHK SIMPANG TILU
31	JATENG	Cilacap	KPHK CILACAP
32		Jepara	KPHK PATI BARAT
33	YOGYAKARTA	Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul dan Sleman	KPHK YOGYAKARTA
34	JATIM	Bondowoso, Jember, Probolinggo dan Situbondo	KPHK DATARAN TINGGI YANG
35		Banyuwangi dan Bondowoso	KPHK KAWAH IJEN
36	BALI	Buleleng dan Tabanan	KPHK BEDUGUL SANGLEH
37		Bangli	KPHK KINTAMANI
38	NTB	Sumbawa dan Dompu	KPHK MOYO
39		Bima	KPHK SANGIANG
40		Sumbawa	KPHK SEMONGKAT
41		Lombok Utara dan Lombok Barat	KPHK SURANADI
42		Sumbawa Barat	KPHK TALIWANG
43		Bima dan Dompu	KPHK TAMBORA
44		Lombok Tengah	KPHK GUNUNG TUNAK
45	NTT	Kupang dan Timor Tengah Selatan	KPHK ALE AISO
46		Kupang	KPHK CAMPLONG
47		Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan	KPHK GUNUNG MUTIS
48		Rote Ndao	KPHK HARLU
49		Malaka	KPHK KATERI
50		Ende	KPHK NDETA KILIKIMA
51		Ngada	KPHK RIUNG
52		Manggarai dan Manggarai Timur	KPHK RUTENG
53		Kupang dan Kota Kupang	KPHK TELUK KUPANG
54		Sikka	KPHK TELUK MAUMERE
55		Alor	KPHK TUTI ADAGE
56		Manggarai Barat	KPHK WAE WUUL

57		Ngada	KPHK WATU ATA
58	KALBAR	Sambas,	KPHK GUNUNG MELINTANG
59		Bengkawang dan Landak	KPHK GUNUNG NYIUT
60		Ketapang	KPHK MUARA KEDAWANG
61	KALTENG	Kotawaringin Barat dan Sukamara	KPHK LAMANDU
62		Barito Utara	KPHK PARARAWEN
63		Pulang Pisau, Kapuas dan Barito Kuala	KPHL UNIT XXXII
64		Murung Raya	KPHP UNIT I
65		Barito Utara dan Barito Selatan	KPHP UNIT VI
66		Barito Utara	KPHP UNIT VIII
67		Kapuas	KPHP UNIT XII
68		Gunung Mas	KPHP UNIT XIII
69		Gunung Mas dan Katingan	KPHP UNIT XV
70		Seruyan dan Kotawaringin Barat	KPHP UNIT XX
71	KALSEL	Barito Kuala dan Banjar	KPHK KUALA LUMPAK
72		Kotabaru	KPHL UNIT IV
73	KALTIM	Kutai Timur dan Kutai Kertanegara	KPHK MUARA KAMAN SEDULANG
74	SULUT	Kota Bitung	KPHK TANGKOKO
75	SULTENG	Banggai	KPHK BAKIRIANG
76		Buol dan Toli-toli	KPHK GUNUNG DAKO
77		Toli-toli dan Parigi Mutong	KPHK GUNUNG TINOMBALA
78		Morowali Utara dan Tojo Una-una	KPHK MOROWALI
79		Poso dan Pamona	KPHK PAMONA
80		Donggaladan Toli-toli	KPHK PANGI BINANGGA
81		Poso	KPHL UNIT X
82		Poso, Morowali, dan Morowali Utara	KPHL UNIT XIII
83		Tojo Unauna	KPHP UNIT XVI
84	SULSEL	Luwu Timur	KPHK TOWUTI
85	SULTRA	Buton dan Kota Baubau	KPHK LAMBUSANGO
86		Konawe Selatan	KPHK PEROPA
87	MALUT	Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula	KPHK TALIABU
88		Pulau Morotai	KPHL UNIT I
89		Halmahera Utara dan Halmahera Barat	KPHL UNIT II
90		Halmahera Timur dan Halmahera Tengah	KPHL UNIT VI
91	PAPUA	Jayapura dan Kota Jayapura	KPHK CYCOOPS YOUTEFA
92		Yahukimo, Olikara, dan	KPHK JAYA WIJAYA

		Pegunungan Bintang	
93		Nabire	KPHK NABIRE TANJUNG WIAY
94		Paniai, Puncak Jaya, Mimika, Asmat, Jayawijayadan Yahukimo	KPHK TN. LORENTZ
95		Merauke	KPHK TN. WASUR
96	PABAR	Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak	KPHK ARFAK
97		Sorong Selatan	KPHK BOLMALIT MAGLIT
98		Manokwari dan Tambora	KPHK GUNUNG MEJA SIDEI KAIRONI
99		Sorong dan Kota Sorong	KPHK SORONG KLAMONO
100		Raja Ampat	KPHK WAIGEO

Tabel 12. Capaian Dari Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH Tahun 2017

No.	Komponen (Unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH	Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH KPH	100 KPH	100 KPH	100
Rata-rata pencapaian kinerja sasaran					100

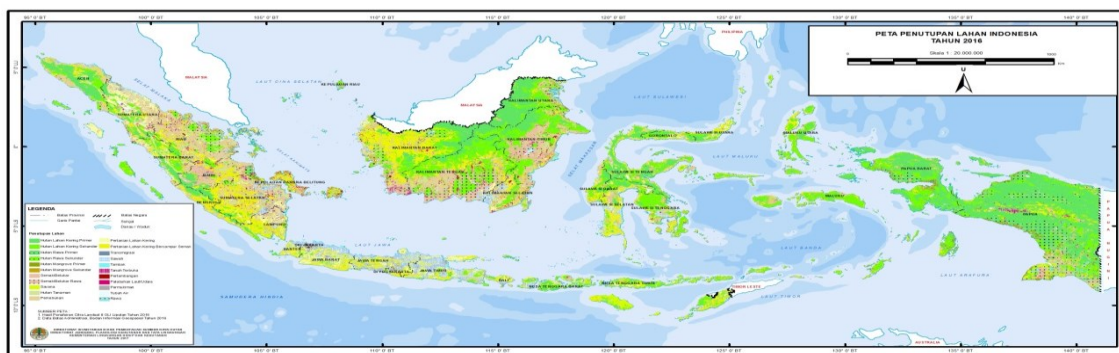
3. Informasi Geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)

3.1 Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional

3.1.1 Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia

Laporan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia menampilkan data dan informasi penutupan lahan terkini di daratan Indonesia meliputi luas dan sebarannya. Pengolahan data rekalkulasi penutupan lahan menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan metode tumpang susun (overlay) antara data digital penutupan lahan dengan kawasan hutan tahun 2016. Sebaran

penutupan lahan disajikan dalam bentuk Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2016 seperti ditampilkan pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2016

Rekalkulasi penutupan lahan Indonesia tahun 2016 dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,8 juta ha yang terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 120,4 juta ha (64,1%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 67,3 juta ha (35,9%). Berdasarkan hasil rekalkulasi penutupan lahan Indonesia secara keseluruhan terhadap luas daratan Indonesia, terdapat lahan berhutan seluas 95,3 juta ha (50,7%) dan lahan tidak berhutan seluas 92,5 juta ha (49,3%). Rekapitulasi Hasil Rekalkulasi Penutupan Lahan selengkapnya disajikan pada Tabel 13, 14, dan 15.

Tabel 13 Penutupan Lahan Indonesia (Ribu Ha)

PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL		TOTAL	%	
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	%	Jumlah			%
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
A. Hutan	17.425	24.094	21.537	18.217	81.274	6.455	87.728	46,7	7.544	4,0	95.272	50,7
B. Non hutan	4.474	5.586	5.252	11.030	26.342	6.353	32.696	17,4	59.784	31,8	92.480	49,3
Total	21.899	29.680	26.789	29.248	107.616	12.808	120.424	64,1	67.328	35,9	187.752	100,0

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

Tabel 14. Sebaran Penutupan Lahan Berhutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

NO	PENUTUPAN LAHAN	LUAS LAHAN BERHUTAN (Ribu Ha)	LUAS PER FUNGSI (Ribu Ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi (HK)	17.425,2	21.898,9	79,6
2	Kawasan Hutan Lindung	24.094,0	29.680,5	81,2
3	Kawasan Hutan Produksi			
	a. HPT	21.536,8	26.788,6	80,4
	b. HP	18.217,5	29.247,7	62,3
	c. HPK	6.454,8	12.808,1	50,4
	sub Total	46.209,1	68.844,4	67,1
	Total Kawasan Hutan (1+ 2 + 3)	87.728,3	120.423,8	72,8
4	Areal Penggunaan Lain	7.543,6	67.328,0	11,2
	Total (1+ 2 + 3 + 4)	95.271,9	187.751,9	50,7

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

Tabel 15 Penutupan Lahan Berhutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribu Ha)

NO.	PULAU/KEPULAUAN	KAWASAN HUTAN							APL	%	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah			%
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah					
1	SUMATERA	3,971.2	3,793.2	1,297.2	3,784.0	12,845.6	196.6	13,042.2	13.7	1,040.2	1.1
2	JAWA	395.1	559.1	290.1	1,109.3	2,353.5	-	2,353.5	2.5	732.8	0.8
3	KALIMANTAN	3,773.2	5,859.0	8,974.4	5,575.8	24,182.3	767.2	24,949.6	26.2	2,262.5	2.4
4	SULAWESI	1,543.4	3,527.5	2,413.4	678.6	8,163.0	284.1	8,447.0	8.9	790.8	0.8
5	BALI NUSATGR	274.9	903.1	337.9	276.8	1,792.7	17.7	1,810.4	1.9	961.9	1.0
6	MALUKU	573.5	993.2	1,287.5	787.9	3,642.2	1,082.0	4,724.1	5.0	252.7	0.3
7	PAPUA	6,893.8	8,459.0	6,936.3	6,005.0	28,294.2	4,107.2	32,401.4	34.0	1,502.8	1.6
	Total	17,425.2	24,094.0	21,536.8	18,217.5	81,273.5	6,454.8	87,728.3	92.1	7,543.6	7.9

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

1.1.2 Penghitungan Deforestasi Indonesia

Laporan Deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan angka deforestasi bruto dengan reforestasi. Laporan Deforestasi yang telah dibuat berdasarkan pengolahan data Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Berdasarkan hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2015 dan 2016 telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2015–2016 sebagaimana tersaji pada Gambar 4.

Gambar 4. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2015 – 2016



Sumber : Data Digital Deforestasi Indonesia Tahun 2015–2016

Tabel 17. Angka Deforestasi per Fungsi Kawasan (Ribuh Ha) Tahun 2015 – 2016

NO	Fungsi Kawasan dan Kawasan Hutan (APL) Bukan	ANGKA DEFORESTASI	%
1	Kawasan Hutan Konservasi	56.827,6	9,0
2	Kawasan Hutan Lindung	79.045,9	12,6
3	Kawasan Hutan Produksi	295.392,7	46,9
	a. HPT	108.264,4	17,2
	b. HP	128.246,8	20,4
	c. HPK	58.881,5	9,4
	sub Total (a + b + c)	295.392,7	46,9
	Total Kawasan Hutan (1 + 2 + 3)	431.266,3	68,5
4	Areal Penggunaan Lain	197.910,6	31,5
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	629.176,9	100,0

Sumber : Pengolahan data, 2017

Tabel 18. Angka Deforestasi Indonesia (Ribuh Ha) Tahun 2015 – 2016

NO	DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							%	APL		TOTAL	%
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		Jumlah	%		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	Hutan Primer	7,7	5,5	10,6	3,8	27,5	2,2	29,8	2,7	25,8	2,4	55,6	5,1
2	Hutan Sekunder	87,3	90,0	59,9	181,4	418,6	52,6	471,1	43,1	214,4	19,6	685,6	62,8
3	Hutan Tanaman	4,7	9,1	1,8	297,0	312,6	2,1	314,7	28,8	36,3	3,3	351,0	32,1
	TOTAL	99,7	104,5	72,3	482,2	758,7	56,9	815,6	74,7	276,6	25,3	1.092,2	100,0

Sumber : Pengolahan data, 2016

Ket. *: Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah tutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh hutan tanaman baik di Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan (APL); terlihat datar dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Tabel 19. Angka Deforestasi pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribuh Ha) Tahun 2015 – 2016

DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							%	APL		TOTAL	%
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		Jumlah	%		
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
SUMATERA	25,2	12,4	35,6	-0,6	72,7	7,6	80,2	12,8	19,1	3,0	99,3	15,8
JAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN	25,1	30,1	33,1	106,1	194,3	37,9	232,2	36,9	132,6	21,1	364,9	58,0
SULAWESI	4,0	24,6	23,7	9,8	62,1	2,3	64,4	10,2	21,1	3,4	85,5	13,6
BALI NUSA TENGGARA	2,0	7,6	3,8	3,2	16,7	-	16,7	2,6	13,2	2,1	29,8	4,7
MALUKU DAN MALUKU UTARA	0,3	3,5	10,8	7,6	22,1	7,4	29,5	4,7	3,2	0,5	32,7	5,2
PAPUA	0,2	0,9	1,3	2,2	4,5	3,7	8,2	1,3	8,7	1,4	17,0	2,7
TOTAL	56,8	79,0	108,3	128,2	372,4	58,9	431,3	68,5	197,9	31,5	629,2	100,0

Sumber : Pengolahan data, 2017

1.1.3 Penelaahan Peta Tematik Kehutanan

Peta-peta yang telah ditelaah oleh Subdit Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan selama Tahun 2017, antara lain :

- a. Penelaahan Tata Batas IUPHHK-HA/HT
 - Rencana penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Permata Borneo Abadi, IUPHHK-HA PT. Inhutani I (Unit S. Kunyit – Simendurut) dan IUPHHK-HTI PT. Adindo Hutani Lestari di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
 - Rencana penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT. Mutiara Kalja Permai batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Barito Nusantara Indah dan IUPHHK-HA PT. Mutiara Kalja Permai Unit I di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
 - Rencana penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT. Mutiara Kalja Permai Unit I batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Belayan River Timber, IUPHHK-HA PT. Melapi Timber, IUPHHK-HA PT. Sumber Mas Timber dan IUPHHK-RF PT. Restorasi Habitat Orang Utan Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
 - Laporan hasil penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI pada Hutan Produksi Tetap (HP) PT. E-Greendo batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Intrado Jaya di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Rencana penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT. Diva Perdana Pesona batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT. Barito Pacific (Unit Bengalon), dan IUPHHK-HTI PT. Santan Borneo Abadi dan IUPHHK-HA PT. Kiani Lestari di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
 - Rencana penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT. Aquila Sylva dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Aditya Kirana Mandiri di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
 - Laporan hasil penataan batas areal kerja IUPHHK-RE PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba, IUPHHK-HA PT. Intertropic Aditama, IUPHHK-HA PT. Sumber Mas Timber dan IUPHHK-HA PT. Mutiara Kalja Permai di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
 - Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Sikatan Wana Raya batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya dan PT. Carus Indonesia di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Kalteng.

- Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Akathes Plywood, PT. Sarang Sapta Putra, PT. Mitra Perdana Palangka dan PT. Kayu Ara Jaya Raya di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Kalteng.
- Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Belantara Persada dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Kedung Madu Tropical Wood, PT. Segara Indochem dan PT. Sumalindo Alam Lestari II di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
- Laporan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Kirana Chatulistiwa batas persekutuan dengan IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Benua, dan PT. Batu Licin Bumi Bersujud, di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Bukit Beringin Makmur dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana Rama, IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber dan IUPHHK-HT PT. Rimba Arga Mas di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Barito Putra dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Karya Delta Permai, IUPHHK-HA PT. Taman Raja Persada, IUPHHK-HA PT. Pematang Abaditama, IUPHHK-HA PT. Austral Byna, IUPHHK-HA PT. Wana Inti Kahuripan Intiga dan IUPHHK- HA PT. Timberdana di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Manokwari Mandiri Lestari di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
- Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari Tbk di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
- Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-RE PT. Alam Sukses Lestari batas persekutuan dengan IUPHHK-RE PT. Hutan Amanah Lestari di Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
- Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Hanujaya Hutanindo batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Nadila Indodaya di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur.
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Sele Raya Agri di Kabupaten Muna dan Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Parwata Rimba di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Sindo Lumber batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Trisetya Citragraha di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Kayu Waja di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Hutan Mulya dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HT PT. Pundi Wana Semesta di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Dwimajaya Utama dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Graha Sentosa Permai, IUPHHK-HA PT. Hutan Mulya, IUPHHK-HA PT. Rinanda Inti dan IUPHHK-HA PT. Pitamaya Asmapara, IUPHHK-HA PT. East Point Indonesia, IUPHHK-HA PT. Yakin Timber Jaya dan PT. Kayu Waja di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Diva Perdana Pesona batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT. Kelawit Wana Lestari, IUPHHK-HTI PT. Multi Kusuma Cemerlang, IUPHHK-HTI PT. Santan Borneo Abadi dan IUPHHK-HA PT. Kiani Lestari di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur.
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Anugerah Rimba Makmur, Batas Persekutuan dengan Kebun PT. ANJ Agri Siais (DH. PT. Ondop Perkasa Makmur) di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
- Pembahasan Rencana dan Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI a.n PT. Rimba Tanaman Industri di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Belantara Subur, batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Balikpapan Wana Lestari dan IUPHHK-HTI Fajar Surya Swadaya di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Sumalindo Lestari Jaya V, batas persekutuan dengan IUPHHK-HA KSU Mayang Putri Prima dan IUPHHK-HA PT. Daya Maju Lestari Unit II di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.

- Pembahasan Rencana dan Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HT a.n PT. Tiesico Cahaya Pertiwi di Kabupaten Musi Bayuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Pembahasan Rencana Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Musi Hutan Persada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
- Pembahasan Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Langgeng Bakti Persada batas persekutuan dengan KHDTK Sangai di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pembahasan Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Borneo Subur Agro batas persekutuan dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, KHDTK Sangai dan KHDTK Hampangan di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Hasmur Jaya Utama di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Borneo Green Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pembahasan Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Amprah Mitra Jaya dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT. Sari Bumi Kusuma, IUPHHK-HTI PT. Pancaran Wana Nusa dan IUPHHK-HA PT. Karda Traders di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pembahasan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Suka Jaya Makmur dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT. Alfa Borneo Hutan Lestari dan IUPHHK-HA PT. Wana Sokan Haselindo di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.

2. Telaah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

- PT. Rianta Jaya, permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah.
- PT. Pesona Bara Cakrawala, permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Penambangan Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah.
- PT. Billy Indonesia, permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Bahan Galian Laterit di Provinsi Sulawesi Selatan.
- SKK MIGAS – PT. MEDCO E & P, permohonan IPPKH Pembangunan Fasilitas ROW Pipeline dari Lapangan Gas Temelat ke Stasiun Gunung Kembang.
- PT. Kalimantan Energi Lestari, permohonan IPPKH untuk eksplorasi Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan.

- PT. Kurnia Mandiri Adiperkasa, permohonan IPPKH untuk operasi produksi Galian Pasir Kwarsa dan saran penunjangnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- PT. PLN (Persero), permohonan IPPKH untuk Pembangunan Transmisi 500 Kv New Aur Duri – Peranap di Provinsi Jambi.
- Pertamina EP (PT. PEP), permohonan IPPKH untuk Jaringan Transmisi 500 Kv di Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. Duta Tambang di Provinsi Kalimantan Selatan.
- PT. Sinar Mineral Utama, permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Bahan Galian Batuan di Provinsi Kalimantan Tengah
- PT. Ichiko Agro Lestari, permohonan IPPKH untuk Pembangunan Sarana Jalan dan Pembangunan Dermaga sebagai sarana Pengangkutan Hasil Produksi Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat.
- SKK MIGAS-BP Berau Ltd, permohonan IPPKH untuk kegiatan Eksplorasi Survey Seismik dan Pengeboran Appraisal di Provinsi Papua Barat.
- PT. Pernick Sultra, permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Nickel dsp di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- PT. Mahakam Maining Development, permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Bahan Galian Barit di Provinsi Kalimantan Barat.
- PT. Bara Anugrah Sejahtera, permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Tambang Batubara di Provinsi Sumatera Selatan.
- SKK MIGAS – PT. BUMI SIAK PUSAKO, permohonan IPPKH untuk Eksisting Operasi Sumur Migas serta sarana penunjangnya di Provinsi Riau.
- PT. Arkora Sulawesi Selatan, permohonan IPPKH untuk Persetujuan PKH Melalui Mekanisme Kerjasama untuk Peningkatan Jalan Akses PLTM Koro Tomasa di Provinsi Sulawesi Tengah.
- SKK MIGAS – Pertamina EP, permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Survei Seismik 3D dan 2D Piraiba dan Seismik 2D Tanjung Area 2 di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- SKK MIGAS – Pertamina EP, permohonan IPPKH untuk Eksisting Operasi Produksi MIGAS di Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. Duta Tambang Rekayasa, permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara Dsp di Provinsi Kalimantan Utara.
- PT. Cakra Adiprima, permohonan IPPKH untuk Jalan Angkut Batubara di Provinsi Sumatera Selatan.
- Gubernur Sulawesi Tengah, permohonan IPPKH untuk Peningkatan Kualitas Jalan Ruas Tamainusa-Towi di Provinsi Sulawesi Tengah.

- PT. Persada Kapuas Prima, permohonan IPPKH untuk Jalan Angkut Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah.
- PT. Anugrah Sukses Mining, permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Nikel di Provinsi Maluku Utara.
- Menteri PUPR, permohonan IPPKH untuk waduk pasaloreng di Provinsi Sulawesi Selatan.
- SKK Migas Pertamina EP, permohonan IPPKH untuk Eksplorasi 3 D Panji di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Menteri Pupera, permohonan IPPKH untuk Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Provinsi Sulawesi Selatan.
- PT. Artha Tunggal Mandiri, permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Provinsi Kalimantan Timur.
- PT. Alam Sutera Tera Energi, permohonan IPPKH untuk Pembangunan PLTA BAH KARAI di Provinsi Sumatera Utara.
- PT. Borneo Indobara, permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara dsp di Provinsi Kalimantan Selatan.
- PT. PLN (Persero), permohonan IPPKH untuk Pembangunan SUTT 150 Kv Tanjung Redep- Tanjung Selor di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- PT. Anugrah Sukses Mining, permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Nikel dsp di Provinsi Maluku Utara.
- SKK MIGAS- Pertamina EP, permohonan IPPKH untuk Pengeboran Eksplorasi Sekar Wangi (SW-1) serta Fasilitas Penunjangnya di Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. Putera Alam Lestari, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Tambang Mineral Logam (Bauksit) dan Sarana Penunjangnya di Provinsi Kalimantan Barat.
- PT. Tower Bersama, permohonan IPPKH untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dan Jalan Akses di Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. Tower Bersama, Permohonan IPPKH untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dan Jalan Akses di Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. PLN (Persero), Permohonan IPPKH untuk Pembangunan SUTT 150 Kv Tenggarong-Kota Bangun dan Gardu Induk Kota Bangun di Provinsi Kalimantan Timur.
- PT. Hampan Anugrah Abadi, Permohonan IPPKH untuk Eksploitasi di Provinsi Kalimantan Timur.
- PT. Raihan Caturputra, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Nikel di Provinsi Sulawesi Tengah.

- PT. Supreme Energy Rantau Dedap, Permohonan IPPKH untuk Eksploitasi Panas Bumi di Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. Labota Bahodopi Soraja, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Nikel dmp di Provinsi Sulawesi Tengah.
- PT. Laroenai Bahodopi Sorahai, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Nikel dmp di Provinsi Sulawesi Tengah.
- PT. Makarti Padabaho Sorajai, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Nikel dmp di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Lapan, Permohonan IPPKH untuk Pembangunan observatorium nasional timau di Provinsi NTT.
- PT. Solu Sindo Kreasi Pratama, Permohonan IPPKH untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dan Jalan Akses di Provinsi Sumatera Selatan.
- Menteri PUPR, Permohonan IPPKH untuk Waduk Rukoh Tiro di Provinsi Aceh.
- Menteri PUPR, Permohonan IPPKH untuk Waduk Kreung Keuroto di Provinsi Aceh.
- PT. Borneo Indo Bara, Permohonan IPPKH untuk Batu Bara di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bupati Lamandau, permohonan IPPKH untuk Pembangunan Jalan Desa Kinipan – Batu Tambun di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mineral Trobos, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Nikel dsp di Provinsi Maluku Utara.
- PT. SKKMIGAS Pertamina EP, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Survei Seismik 3 D & 2D Piraiba dan 2D Tanjung Area 2 di Provinsi Kalimantan Tengah.
- PT. Roshini Indonesia, Permohonan IPPKH untuk Eksploitasi Bijih Besi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- PT.Jangkar Prima, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara dsp di Provinsi Kalimantan Tengah.
- PT. Saraba Kawa, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan.
- PT.Bright PLN Batam (Pelayanan Listrik Nasional Batam), Permohonan IPPKH untuk Pembangunan Infrastruktur Asset Strategis Nasional Pembangkit Listrik, Gardu Induk dan Transmisi 150 Kv di Pulau Batam di Provinsi Kepri.
- PT. Oty Eya Abadi, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Bijih Nikel dmp di Provinsi Sulawesi Tengah.

- PT. SKK Migas Pertamina EP, permohonan IPPKH untuk Eksisting Operasi Produksi MIGAS di Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. PLN (Persero), Permohonan IPPKH untuk Pembangunan SUTT 150 Kv Marisa –Moutong-Kotaraya di Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo.
- PT.Bukit Asam, Permohonan IPPKH untuk Eksploitasi Penambangan Batubara di Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- PT.Batu Jelita Perkasa, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Kab. Barito Utara dan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- PT.Insani Bara Perkasa, Permohonan IPPKH untuk Perubahan areal APL (KBNK) berubah menjadi KBK di Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- PT. Bio Inti Agrindo, Permohonan IPPKH untuk Pelabuhan di Kab. Boven Digoel Provinsi Papua.
- PT.SKK MIGAS-Petrochina International Jabung Ltd, Permohonan IPPKH untuk Pembangunan Jalur Pipa Migas (ROW) dari Sabar #2 PAD ke Existing (ROW) dari WB PPF-NEB #9 PAD di Kab. Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi
- Bupati Malinau, Revisi IPPKH untuk Pembangunan Jalan Perbatasan dan Pedalaman di Provinsi Kalimantan Utara.
- PT. Bimaruna Abadi, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Menteri PU & PR RI (PSN), Permohonan IPPKH untuk Pembangunan Bendungan Ladongi di Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.
- PT. Muria Sumba Manis, Permohonan IPPKH untuk Pembangunan Perkebunan Tebu di Kab. Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- PT. Elsaday Mulia, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Bahan Galian Nickel dsp di Kab. Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.
- PT. Transcoal Minergy, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Tambang Batubara di Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- PT.Wanatiara Persada , Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Nikel dmp beserta sarana penunjangnya di Kab. Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara.
- PT. Sela Bara, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara dsp di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- PT. Sarolangun Ketalo Coal, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Kab. Sarolangun, Batanghari Provinsi Jambi.

- PT. PLN, Permohonan IPPKH untuk Pembangunan Tenaga Listrik Tegangan Ekstra Tinggi 500kV wilayah Sumatera-Jawa di Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering ulu Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. Anjas Anita Jaya, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Provinsi Kalimantan Utara.
- PT. Bara Sumatera Energi, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. Borneo Indobara, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan.
- PT. Mahligai Artha Sejahtera, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Nike dmp dan dsp di Provinsi Sulawesi Tengah.
- PT. J Resources Bolaang Mongondow (Blok Bakan II), Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Emas Dmp di Provinsi Sulawesi Utara.
- Menteri PU & PR RI (PSN), Revisi IPPKH untuk Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang- Kayu Agung di Kab.Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. Wira Bara Sakti, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara dsp di Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- SKK Migas – MontD’Or Oil Tungkal Ltd, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Sumur Bekas-1 dan Akses Jalan di Kab. Batang Hari Provinsi Jambi.
- Keinz Ventura, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Bijih Nikel Dmp di Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, Permohonan IPPKH untuk PLTM Santong di Kab. Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- PT.Berau Coal, Permohonan IPPKH untuk Perubahan Luasan Operasi Batubara di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur.
- PT.Sambas Mineral Mining, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Nikel dsp di Kab. Konawe Selatan di Provinsi SULTRA.
- SKK MIGAS – PT. Medco E&P Indonesia, Permohonan IPPKH untuk Lokasi Eksisting Kegiatan Operasional Produksi Sumur Minyak dan Gas Bumi di Kab. Musi Rawas, Kab. Muara Enim, Kab. Penukal abab Lematang Ilir, Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. Brantas Hidro Energi, Permohonan IPPKH untuk PLTM di Kab. Kaur Provinsi Bengkulu.
- PT. Wampu Electric Power, Permohonan IPPKH untuk Perubahan (Pengembalian disertai Penambahan) Areal IPPKH untuk Pembangunan PLTA dsp di Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara.

- PT. Usaha Baratama Jesindo, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara dsp di Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- PT. Raisan Energi Indonesia, Revisi IPPKH untuk PLTM Aek Pungga di Kab. Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.
- PT. Hitay Daya Energi, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Panas Bumi di Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat.
- SKK Migas –PT. Medco E&P Indonesia, Permohonan IPPKH untuk Pemboran Sumur Eksplorasi Flamboyan-1 dan Pembuatan Hak Akses Jalan di Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
- SKK Migas – PT. Pertamina EP, Permohonan IPPKH untuk Eksisting Operasi Produksi Migas di HL di Kab. Tarakan, Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- PT. Arkora Hydro Sulawesi, Permohonan IPPKH untuk PLTM Koro Yaento (2x5 MW) di Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah.
- PT. PLN (Persero), Permohonan IPPKH untuk Pembangunan SUTT 150Kv GI Tanjung Selor-GI Tideng Pale-GI Malinau di Kab. Tana Tidung, Kab. Bulungan, Kab. Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
- PT. Timah (Persero), Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Mineral Logam Timah dmp di Kab. Bangka Selatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- PT. Unirich Mega Persada, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Batubara di Kab. Barito Provinsi Kalimantan Tengah.
- PT. UPC SIDRAP BAYU ENERGY, Permohonan IPPKH untuk energi angin di Provinsi Sulawesi Selatan.
- PT. Perusahaan Gas Negara, Permohonan IPPKH untuk energi listrik di Provinsi Jawa Barat.
- PT. Pari Coal, Permohonan IPPKH untuk batubara di Provinsi Kalimantan Timur.
- PT. Borneo Indobara, Revisi IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan.
- PT. Vale Indonesia (Tbk), Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Pertambangan Nikel di Provinsi Sulawesi Selatan.
- PT. PLN (Persero), Permohonan IPPKH untuk Pembangunan SUTT 150 Kv Bangkanai-Melak di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
- PT. Sumatera Energi Lestari, Permohonan IPPKH untuk PLTM Ordi Hulu di Provinsi Sumatera Utara.
- PT. Syailendra Utama Energy, Permohonan IPPKH untuk PLTM Simonggo 2x24 MW di Provinsi Sumatera Utara.

- PT. PLN Persero, Permohonan IPPKH untuk Listrik di Provinsi Bengkulu.
- PT. Bara Sumatera Energy, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Provinsi Sumatera Selatan.
- PT. Citra Dayak Indah, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Provinsi Kalimantan Timur.
- Men PUPR, Permohonan IPPKH untuk Jalan Paralel Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.
- PT. XL Axiata, Permohonan IPPKH untuk BTS di Provinsi Lampung.
- PT. Sulawesi Cahaya Mineral, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- PT. PLN Persero, Permohonan IPPKH untuk Listrik di Provinsi Papua.
- PT. Batubara Nusantara Kaltim, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Batubara di Provinsi Kalimantan Timur.
- PT. Kaltim Nusantara Coal, Permohonan IPPKH untuk Eksplorasi Batubara di Provinsi Kalimantan Timur.
- PT. Duta Tambang Sumber Alam, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Provinsi Kalimantan Utara.
- PT. Bara Tabang, Permohonan IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara di Provinsi Kalimantan Timur.

1.1.4 Dokumentasi Data dan Peta

Keberadaan peta-peta baik yang merupakan peta dasar, peta tematik kehutanan dan peta tematik non kehutanan, tersedia dalam berbagai skala dan letaknya sesuai dengan wilayah administratif pemerintahan dari mulai tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten dan kecamatan dengan berbagai jenis peta dan kepentingan dari hasil pemetaan lahan yang memuat berbagai sumber daya hutan. Untuk memudahkan dalam pencarian dan mendapatkan peta-peta dimaksud dan dalam rangka pendokumentasian peta-peta yang tersedia, maka diupayakan keberadaan peta-peta tersebut dihimpun dalam bentuk buku indeks peta yang diklasifikasikan berdasarkan peta dasar (RBI, TOP, JOG dan peta dasar lainnya), peta-peta tematik kehutanan (Peta penutupan lahan, Peta Deforestasi, Peta Degradasi Kawasan Hutan, peta pemanfaatan kawasan hutan, peta penggunaan kawasan hutan, Peta Rehabilitasi dan reboisasi Lahan dan Peta Ekosistem Alam Hayati lainnya) yang telah dibuat dan dipublikasi oleh Kementerian Kehutanan, Peta Tematik Non Kehutanan (Peta Kelereng/Kontur, Peta Jenis Tanah, Peta Geologi, Peta Iklim/Intensitas Curah Hujan dan peta

lainnya) yang tersedia dalam berbagai skala pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Ketersediaan peta dasar dan peta tematik non kehutanan di seksi Dokumentasi Peta Sumber Daya Hutan sebagai berikut:

TABEL V.4. PERKEMBANGAN PENDOKUMENTASIAN PETA DASAR TAHUN 2016

NO	PROVINSI	RUPA BUMI INDONESIA (RBI) (Lembar)										TOPOGRAFI (TOP) (Lembar)								JOG	TPC	ONC			
		1:25000		1:50.000		1:100.000		1:250.000		1:1.000.000		1:50.000	1:100.000	1:200.000	1:250.000	1:500.000	1:1.000.000	1:250.000	1:500.000				1:1.000.000		
		Cetak	Digital	Cetak	Digital	Cetak	Digital	Cetak	Digital	Cetak	Digital	Cetak	Digital	Cetak	Digital	Cetak	Digital	Cetak	Digital	Cetak	Digital	Cetak	Digital	Cetak	Digital
1	Aceh	-	-	96	113	-	-	11	-	-	-	99	22	-	-	-	-	-	-	4	4	11	-	4	2
2	Sumatera Utara	-	-	71	154	-	-	12	9	2	2	102	22	7	7	2	2	2	2	4	1	9	2	2	2
3	Sumatera Barat	-	-	-	103	-	-	10	-	2	5	40	36	12	40	2	2	2	2	2	11	11	2	2	2
4	Riau	-	-	150	158	-	-	14	-	4	5	78	74	16	-	4	4	5	5	16	16	4	4	2	2
5	Kepulauan Riau	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	65	86	-	-	8	-	2	5	21	40	6	6	1	1	2	2	9	9	1	1	1	1
7	Bengkulu	-	-	32	51	-	-	5	-	3	5	52	21	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	1	1
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	53	-	-	7	-	1	5	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
9	Sumatera Selatan	-	-	14	151	-	-	9	-	2	5	112	64	7	7	4	4	4	4	10	10	2	2	2	2
10	Lampung	6	-	-	70	-	-	3	-	2	5	77	38	2	2	2	2	2	6	6	6	6	2	2	2
11	DKI Jakarta	20	19	-	-	-	-	-	-	1	5	4	8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Jawa Barat	290	233	-	-	-	-	-	-	2	5	116	14	4	4	3	3	3	3	8	8	2	2	2	2
13	Banten	94	80	-	-	-	-	-	-	1	5	30	-	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
14	Jawa Tengah	231	233	-	-	-	-	-	-	1	5	113	26	6	6	2	2	2	2	8	8	1	1	1	1
15	D.I Jogjakarta	14	28	-	-	-	-	-	-	1	5	15	-	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1
16	Jawa Timur	374	344	-	-	-	-	-	-	4	5	164	-	4	4	-	-	-	10	10	2	2	2	2	2
17	Bali	87	51	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	1	1
18	Nusa Tenggara Barat	213	180	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	6	6	1	1	1	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	498	426	-	-	-	-	-	-	2	5	-	21	-	-	-	-	-	14	14	2	2	2	2	2
20	Kalimantan Barat	-	-	84	260	-	-	4	-	3	5	170	-	-	-	-	-	-	6	6	1	1	1	1	1
21	Kalimantan Tengah	-	-	194	242	-	-	4	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	12	12	3	3	3	3	2
22	Kalimantan Timur	-	-	177	223	-	-	5	-	4	5	24	-	11	11	1	1	1	18	18	4	4	4	4	2
23	Kalimantan Selatan	-	-	125	83	-	-	6	-	2	5	34	31	-	-	-	-	-	17	17	4	4	4	4	2
24	Kalimantan Utara	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	1	1	1	1	1
25	Gorontalo	-	-	32	35	-	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1
26	Sulawesi Utara	-	-	70	42	-	-	9	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	9	9	1	1	1	1	1
27	Sulawesi Tengah	-	-	189	168	-	-	12	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	16	16	3	3	3	3	4
28	Sulawesi Selatan	-	-	98	104	-	-	13	-	4	5	-	22	-	-	-	-	-	13	13	4	4	4	4	1
29	Sulawesi Tenggara	-	-	77	76	-	-	6	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	7	7	2	2	2	2	1
30	Sulawesi Barat	-	-	1	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	298	-	-	174	-	-	-	-	4	5	-	42	-	-	-	-	-	6	6	2	2	2	2	1
32	Maluku Utara	-	-	38	117	-	-	-	-	3	5	-	47	-	-	-	-	-	15	15	2	2	2	2	2
33	Papua	-	-	-	458	-	-	-	-	8	5	27	100	-	-	-	-	-	44	44	7	7	7	7	3
34	Papua Barat	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		2125	1594	1513	3359	10	10	139	9	77	150	1278	670	64	78	39	72	300	67	48					

Sumber : Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Ket :
 JOG : Joint Operations Graphic Ground
 TPC : Tactical Pilotage Chart
 TTC : Topographic Tactical Chart
 ONC : Operational Navigation Chart

NO.	PROVINSI	PETA TEMATIK UNTUK PEMBANGUNAN KEHUTANAN						LERENG
		TANAH		IKLIM		GEOLOGI		
		1:250.000 Tersedia (lembar)	1:1.000.000 Tersedia (lembar)	1:250.000 Tersedia (lembar)	1:1.000.000 Tersedia (lembar)	1:250.000 Tersedia (lembar)	1:1.000.000 Tersedia (lembar)	1:250.000 Tersedia (lembar)
1	Aceh	5	-	8	-	8	-	1
2	Sumatera Utara	8	1	10	1	8	1	1
3	Sumatera Barat	3	1	6	1	4	1	1
4	Riau	6	1	6	1	-	1	1
5	Kepulauan Riau	4	-	4	-	-	-	-
6	Jambi	3	1	3	1	-	1	1
7	Bengkulu	2	1	3	-	3	1	1
8	Kep.Bangka Belitung	2	-	5	-	2	-	-
9	Sumatera Selatan	4	1	5	1	4	1	1
10	Lampung	3	-	3	-	3	-	1
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	1
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	1
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	1
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	1
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	1
20	Kalimantan Barat	14	1	-	-	2	1	1
21	Kalimantan Tengah	10	1	-	-	12	-	1
22	Kalimantan Timur	18	1	-	-	2	-	-
23	Kalimantan Selatan	4	1	-	1	-	1	-
24	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	1
25	Sulawesi Utara	9	1	9	1	1	1	1
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	1	1	1	1
27	Sulawesi Selatan	10	1	10	1	1	1	-
28	Sulawesi Tenggara	6	1	6	1	1	-	1
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	1
30	Maluku	-	-	-	-	-	-	1
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	1
32	Papua	-	-	-	-	-	-	1
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	111	13	78	10	52	11	23

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

1.1.5 Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan

Kegiatan terkait dengan sosialisasi teknis pemetaan sumber daya hutan pada Subdit Pemetaan dan Dokumentasi Tematik menghasilkan *output* berupa terbitnya Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara umum Perdirjen PKTL ini merupakan pengganti dari peraturan Perdirjen PKTL Nomor : P.3/VII-IPSDH/2014 terdahulu yang sudah disempurnakan dan dilengkapi dengan *template* simbologi, *grid* dan *layout* yang telah diatur sesuai dengan peraturan dari Badan Informasi Geografi sebagai badan yang berwenang dalam mengatur tentang pemetaan di Indonesia. Pada Perdirjen PKTL Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 ini juga telah dilengkapi dengan lampiran yang dilengkapi dengan soft file berupa contoh dalam bentuk format aplikasi pemetaan yang umum digunakan (Arc GIS) yang terdiri dari simbologi, *layout* dalam format *mx*d dan *grid*. Hal ini ditempuh guna menyeragamkan hasil penyajian peta yang nantinya akan diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau swasta dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh Indonesia. Beberapa perbedaan dan penyempurnaan yang telah diterbitkan pada Perdirjen PKTL Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 dengan Perdirjen PKTL Nomor : P.3/VII-IPSDH/2014 dapat dilihat pada Tabel19 di bawah ini.

Tabel19. Penyempurnaan Perdirjen PKTL Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 terhadap Perdirjen PKTL Nomor : P.3/VII-IPSDH/2014.

No.	Perubahan/perbedaan	Perdirjen Planologi Kehutanan Nomor : P.3/VII-IPSDH/2014	Perdirjen PKTL Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017
1.	Layout dan tata letak informasi peta	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi tepi kurang lengkap : - tidak ada ketentuan nomor dan lembar peta - logo instansi dan legalitas berada di bawah - layout masih belum ada penyeragaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi tepi ada beberapa penambahan - sudah ada ketentuan nomor dan lembar peta - logo instansi terletak paling atas sebelum judul, legalitas disebelah tengah kecuali legalitas para pihak - layout sudah ada template dan penyeragaman
2.	Simbologi	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya beberapa ketidaksinkronan antara warna dan kode RGB - Simbologi yang masih terbatas - Simbologi ada yang dibuat manual oleh user - belum adanya grid custom (user kadang membuat sendiri) 	<ul style="list-style-type: none"> - warna dan kode RGB sudah sinkron - ada beberapa penambahan simbol yang dapat mengakomodir simbol yang belum ada - sudah ada template simbol sehingga menyeragamkan dan memudahkan user - Sudah ada template custom grid untuk memudahkan dan menyeragamkan penggunaan oleh user
3.	Penjelasan per bab	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan per bab yang kurang lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan per bab yang lebih lengkap dan rinci disertai contoh

Dokumen Perdirjen PKTL beserta lampirannya dimaksud juga telah didistribusikan ke setiap Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan serta telah didistribusikan ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I sampai dengan BPKH Wilayah XXII selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat daerah pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kegiatan lanjutan yang rencananya akan dilaksanakan setelah diterbitkan Perdirjen Perdirjen PKTL Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 pada tahun 2018 yakni sosialisasi ke tingkat daerah, upaya ini merupakan bagian dari kegiatan pelaksanaan manajemen pemerintahan berupa *actuating* dan *controlling* di tingkat daerah agar peraturan dimaksud dapat dilaksanakan supaya *outcome* yang diharapkan dapat tercapai.

1.1.6 Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Sebagai implementasi dari Inpres dimaksud khususnya Amar Ketiga yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Hingga akhir tahun 2017, telah dilakukan revisi sebanyak 13 (Tiga Belas) kali terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Secara detail disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20. Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB Hingga Tahun 2016

No.	PIPIB	No. SK	Tanggal
1	PIPIB	SK.323/Menhut-II/2011	20 Juni 2011
2	PIPIB Revisi I	SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	22 November 2011
3	PIPIB Revisi II	SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	16 Mei 2012
4	PIPIB Revisi III	SK.6315/Menhut- VII/IPSDH/2012	19 November 2012
5	PIPIB Revisi IV	SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	16 Mei 2013
6	PIPIB Revisi V	SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013	13 November 2013

No.	PIPIB	No. SK	Tanggal
7	PIPIB Revisi VI	SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 Mei 2014
8	PIPIB Revisi VII	SK.6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 November 2014
9	PIPIB Revisi VIII	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	27 Mei 2015
10	PIPIB Revisi IX	SK. 5385/MenLHK- PKTL/IPSDH/2015	20 November 2015
11	PIPIB Revisi X	SK.2300/MenLHK- PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016	20 Mei 2016
12	PIPIB Revisi XI	SK.6347/MenLHK- PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	21 Nopember 2016
13	PIPIB Revisi XII	SK. 351/MENLHK/Setjen/PLA.1/7/2017	31 Juli 2017
14	PIPIB Revisi XIII	SK. 6559/MENLHK- PKTL/IPSDH/PLA.1/ 12/2017	4 Desember 2017

Pada Tahun 2017 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 351/MENLHK/Setjen/PLA.1/7/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan No. SK. 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PIPIB Revisi XII dan XIII) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.



Luas moratorium berdasarkan kriteria pada PIPPIB Revisi XII dan Revisi XIII disajikan pada Tabel 21 dibawah ini:

Tabel 21. Luas Moratorium Berdasarkan Kriteria Pada PIPPIB Revisi XII Dan XIII

No.	Keterangan Perubahan	Revisi XII Luas (Ha)	Revisi XIII Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres 10 Tahun 2011	-25.347	-11.485
2.	Pembaharuan data perizinan	-50	-31
3.	Pembaharuan data bidang tanah	-3.025	-557
4.	Perkembangan Tata Ruang	9.281	-1.024
5.	Laporan hasil survey lahan gambut	1.514	5.113
6.	Laporan hasil survey hutan alam primer	-84.882	-4.519
7.	Pengecualian Moratorium	-14	
	Jumlah	-102.524	-12.503

Perubahan pada PIPPIB revisi XII diuraikan secara lengkap pada Tabel 22 berikut:

Tabel 22 . Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Revisi XII

No	Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya	-25.347
	- Masukan dari masyarakat ttg Izin dan Penguasaan Lahan (27 permohonan) terdiri dari HGU, IUP, SHM dan kepemilikan lahan sebelum Inpres 10 tahun 2011	
2.	Pembaharuan data perizinan	-50
	-Pemda Kab. Banggai dan Pemda Kab. Keerom	
3.	Pembaharuan data bidang tanah	-3.025
	- Data HGU/Kadastral yang diperoleh dari PT. Agronusa Investama dan PT. Rimbun Sawit Papua	
4.	Perkembangan Tata Ruang	9.281
	-Perubahan fungsi hutan konservasi /lindung mejadi hutan produksi/APL dan sebaliknya	
6.	Laporan hasil survei Lahan Gambut	1.514
	-Survey oleh BBSDLP sebanyak 9 lokasi	

5.	Laporan hasil survei Hutan Alam Primer	-84.882
	-Survey oleh Dishut Prov, Dishut Kab, dan Perguruan Tinggi (kehutanan) sebanyak 8 lokasi	
7.	Pengecualian Moratorium	-14
	-Permohonan kegiatan <i>geothermal</i> PT. Pundi Global Investama	
Jumlah		-102.524

Perubahan pada PIPPIB revisi XIII diuraikan secara lengkap pada Tabel 23. berikut:

Tabel 23 . Luas Keterangan Perubahan pada PIPPIB Revisi XIII

No	Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya	-11.485
	-Masukan dari masyarakat ttg izin dan penguasaan lahan (36 permohonan) terdiri dari HGU, IUP, SHM, dan kepemilikan lahan sebelum Inpres 10 tahun 2011	
2.	Pembaharuan data perizinan	-31
	-PT Sinar Wijaya Plywood Industries	
3.	Pembaharuan data bidang tanah	-557
	-Data HGU/Kadastral yang diperoleh dari PT. Sawit Bertuah Lestari	
4.	Perkembangan Tata Ruang	-1.024
	-Perubahan fungsi Hutan Lindung mejadi hutan Hutan Produksi Terbatas	
6.	Laporan hasil survei Lahan Gambut	5.113
	-Survey oleh BBSDLP sebanyak 5 permohonan	
7.	Laporan hasil survei Hutan Alam Primer	-4.519
	-Survey oleh Dishut Prov. BPKH, dan Perguruan Tinggi (Kehutanan) sebanyak 13 permohonan	
J U M L A H		-12.503

Bahan penyusunan revisi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin baru dapat berasal dari masukan masyarakat melalui surat yang ditujukan kepada

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maupun Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

1.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional

3.2.1 Penyusunan Basis Data Spasial LHK

Dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan, pada tahun 2017 telah disusun buku Basis Data Spasial Kehutanan Tahun 2017, leaflet serta beberapa media publikasi lainnya seperti : tali name tag, bag.

Penyusunan buku basis data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun tujuannya adalah untuk mempublikasikan informasi basis data spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk buku sehingga pengguna yang dapat memanfaatkan basis data geospasial kehutanan menjadi semakin luas. Adapun saran publikasi lainnya disusun dalam mendukung penyebarluasan informasi tentang pengelolaan data geospasial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada publik/masyarakat sehingga dapat disebarluaskan dalam kegiatan kegiatan seperti pameran.

Subdirektorat Jaringan Data Spasial selain mengelola basis data spasial untuk berbagi pakai dengan unit kerja di lingkup KLHK, juga melaksanakan kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan permohonan pemanfaatan data spasial baik untuk pihak internal maupun eksternal KLHK. Pelayanan data yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 24 . Pelayanan Data Penyusunan Basis Spasial Tahun 2017

No	Pemohon	Jenis Data	Format Data	Cakupan	Keterangan
1.	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)	Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG)	Shp	Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua	Konsultasi public tentang penetapan peta indikatif fungsi ekosistem gambut nasional
2.	Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, Ditjen PSKL	Kawasan Hutan	Shp	Indonesia	Analisa data hutan adat overlay dan peta kawasan
3.	Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen GAKUM	- Sebaran IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE - Deforestasi 2014-2015, 2013-2014,	Shp Shp	Indonesia Indonesia	Antisipasi terjadinya gangguan keamanan hutan

No	Pemohon	Jenis Data	Format Data	Cakupan	Keterangan
		2012-2013, 2011-2012, 2009-2011			
4.	Universitas Brawijaya	- Data Penutupan Lahan 2015 - Data RBI 1:50.000 - Citra SPOT 6		Kalimantan Timur	Penelitian
5.	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	- Kawasan Hutan - Penutupan Lahan	Shp	Indonesia	Penyusunan rantek aerial seeding
6.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Peta Penutupan Lahan time series tahun 2009, 2011, 2013, 2015	Shp	Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat	Penulisan tugas akhir (skripsi)
7.	P3E Papua	- RBI 2016 - Penutupan Lahan 2015 - Citra SPOT	Shp ECW	Papua	
8.	Direktorat P3E Jawa	RBI 2016	Shp	Jawa	Direktorat P3E Jawa
9.	Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS	- Kawasan Hutan mulai TGHK s.d 2016 - Kamus Data Spasial 2016 - RBI Versi Agustus 2016 - SRTM 30 meter	Jpg, Shp Word Shp	Indonesia	Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS
10.	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	- RBI Versi Agustus 2016 - Kawasan Hutan - Penutupan Lahan 2015	Shp Shp Shp	Indonesia Indonesia Indonesia	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
11	Biro Keuangan	Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016	Buku		1 Eksemplar
12	Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Data CSRT Penutupan Lahan 2015 Kawasan Hutan	Shx Shp Shp	Indonesia Indonesia Pulau Jawa	
13.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III	- RBI - Perubahan Fungsi Kawasan Hutan - Data IUPHHK-HT, HA, HTR, RE, IPPKH, Pelepasan Kebun - Penetapan Wilayah KPHP - Peta Citra Satelit SPOT 6 tahun 2013 s.d 2016 (mozaik)	shp		

No	Pemohon	Jenis Data	Format Data	Cakupan	Keterangan
14	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	<ul style="list-style-type: none"> - Citra SPOT 6 - RBI Versi Agustus 2016 - Penutupan Lahan 2015 - Data DEM SRTM - Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 	shp Buku	Jawa	Untuk keperluan penguatan database berbasis spasial dan tabular
15	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi 3	<ul style="list-style-type: none"> - Penutupan Lahan - Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 	Shp	Indonesia	
16	BPKH II Palembang	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 - Pin - Leaflet 			1 Eksemplar 10 Eksemplar 20 Eksemplar
17	Direktorat Jenderal PKTL	<ul style="list-style-type: none"> - IUPHHK-RE - IUPHHK-HA 	shp	Indonesia	
18	PT. Musim Mas	<ul style="list-style-type: none"> - Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) dan Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) 		Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Papua	
19	Universitas Indonesia (Fatisya)	<ul style="list-style-type: none"> - Penutupan Lahan tahun 1990-2015 	Shp	DAS Ciliwung	Tesis
20	Balai PPI dan Kebakaran Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi - Kawasan Hutan - Penutupan Lahan - Kemiringan Lereng - KPH - DAS - SRTM - Potensi Longsor, Banjir - Buku Basis Data Spasial 2016 - Kamus Data Spasial 	Shp	Jawa Nusa	
21	Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung - Penutupan Lahan 	Shp	Indonesia	
22	Bupati Bengkulu Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Hutan - Penutupan Lahan 	shp	Kab Bengkulu Utara	
23	Balai PPPI dan Kebakaran Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi (jalan, sungai, desa, kecamatan, 	shp	Jawa Nusa	

No	Pemohon	Jenis Data	Format Data	Cakupan	Keterangan
		kabupaten) - Kawasan - Penutupan Lahan - Kemiringan Lereng - KPH - DAS - SRTM - Potensi Longsor, banjir - Buku Basis Data Spasial 2016 - Kamus Data Spasial	Buku		
24	Direktur Panas Bumi, Dirjen Energi Baru, Terbarukan Dan Konservasi Energi	- Data kawasan hutan seamless bulan Januari 2017 (shp) - Data IUP yang sudah beroperasi produksi	shp	Indonesia	
25	Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Provinsi Riau, Sumatera Barat Dan Kep. Riau	- RBI - Perubahan Fungsi Kawasan - IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, HTR, RE, IPPKH dan pelepasan kawasan hutan - Penetapan wilayah KPHP - Peta citra satelit spot 6 periode tahun 2013-2015	shp	Riau, Sumatera Barat Dan Kep. Riau	
26	Kepala Badan Restorasi Gambut RI	- Burn Area tahun 2015 - Kesatuan Hidrologi Gambut - Fungsi Ekologi Gambut - IUPHHK-HT, IUPHHK-HA dan RE	shp	Indonesia	
27	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir	- Kesatuan Hidrologi Gambut - Fungsi Ekologi Gambut	shp	Kabupaten Indragiri Hilir	
28	Subdirektorat Data dan Informasi, Setditjen PKTL	- Pin - Leaflet			Untuk bahan pameran Pekan Lingkungan 2017
29	PT. Paramitra Mulia Langgeng	- Burn Area tahun 2015 - Indikasi PIAPS - PIPPIB	shp	Lokasi PT. Paramitra Mulia Langgeng	Untuk Revisi RKUPHHK-HTI
30	PT. Global Agro Lestari	- Fungsi Ekologi Gambut	shp	Lokasi PT. Global Agro	

No	Pemohon	Jenis Data	Format Data	Cakupan	Keterangan
				Lestari	
31	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat	- Kawasan Hutan - Mangrove	shp	Sumatera Barat	Untuk Penyusunan Ranperda dan Dokumen RZWP3K
32	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	- Penutupan Lahan tahun 2016	shp	Kalimantan Timur	Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur
33	Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	- Penutupan Lahan tahun 2016	Shp	Kalimantan	Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2016
34	BIG	- Kesatuan Hidrologi Gambut - Fungsi Ekosistem Gambut	Shp	Indonesia	
35	Afrita Satya Dewi (IPB)	- ALOS AVNIR dan PRISM tahun 2007 - SPOT 6 dan 7 2016 - Mosaik SPOT 6 dan 7 tahun 2013-2016	TIFF JPEG 2000 ECW	Jawa Barat	Penelitian
36	Kementerian ATR/BPN Kanwil Provinsi Aceh	- Kawasan Hutan	Shp	Provinsi Aceh	Sinkronisasi dan sinergi kegiatan penyediaan TORA
37	BIG	- Peta Hutan Adat			
38	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	- Fungsi Ekosistem Gambut Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Shp	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
39	Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Ditjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan	- Data Penutupan Lahan Tahun 2015 - Data Rehabilitasi Lahan disekitar DAS Prioritas Tahun 2014-2016	Shp	Seluruh Indonesia	
	Dinas Kehutanan Provinsi Riau	- Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi Riau Skala 1:50.000	Shp	Provinsi Riau	
40	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Penutupan lahan tahun 2016 - Citra SPOT	Shp ecw	Jawa dan Madura Kalimantan	
41	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 dalam format Shapefile (Shp).	Shp	Provinsi Riau	
42	Dinas Kehutanan Provinsi Papua	Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	Shp	Provinsi Papua	Penelaahan permohonan pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa

No	Pemohon	Jenis Data	Format Data	Cakupan	Keterangan
					(HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-Hkm) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) di Provinsi Papua.
43	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	Permintaan Data Tutupan Lahan (Shp)	Shp	Pulau Jawa dan Madura	sebagai bahan dalam rangka pengendalian pembangunan Sektor Kehutanan di Wilayah Ekoregion Jawa .
44	Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial	- IUPHHK RE dan HT - Hutan Kemasyarakatan - Hutan Tanaman Rakyat) - Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan - Pelepasan Kebun - Data Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG)	Shp	Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau	
45	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	- Peta Fungsi Ekosistem Gambut - Peta PIPPIB XI		Provinsi Kalimantan Barat	
46	PT. Chevron Pacific Indonesia	- Peta Kesatuan Hidrologi Gambut		Provinsi Riau	Untuk Penyusunan Dokumen AMDAL dan RKL-RPL Rencana Pembangunan Infrastruktur Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi Beserta Infrastruktur Pendukungnya Koridor Minas, Siak - Duri, Bengkalis – Balam/Bangko, Rokan Hilir – Dumai
47	Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo	citra SPOT 6 dan Citra SPOT 7 tahun 2013 sampai dengan tahun 2016	ecw	Wilayah Taman Nasional Tesso Nilo	
48	Ketua Hubungan Masyarakat Koperasi Jasa Peduli Kasih	Peta Kawasan Hutan dan Tutupan Lahan	jpg	Kabupaten Sumba Timur	
49	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur	- Penutupan lahan tahun 2015	Shp	Kabupaten Kaur	

No	Pemohon	Jenis Data	Format Data	Cakupan	Keterangan
50	Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		-	-	Penyampaian Informasi untuk mengakses geoportal.menlhk.go.id
51	Dinas Kehutanan Provinsi Papua	TORA	Shp	Provinsi Papua	Untuk proses penelaahan dan acuan penyelesaian alokasi TORA
52	Kepala Pusat Penelitian Biologi-LIPI	Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 1990-2000 dan 2000-2015	Shp	Seluruh Indonesia	Data hanya digunakan untuk penelitian Botani yang ada di Puslit Biologi-LIPI
53	Badan Informasi Geospasial	Peta Penutup Lahan Tahun 2016 Skala 1:250.000 dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Shp	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan	Badan Informasi Geospasial
54	Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016	Shp	Seluruh Indonesia	Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
55	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	Citra SPOT 6	ecw	Kalimantan dan Sumatera	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
56	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peta Kawasan Hutan	Shp	Wilayah Sulawesi.	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
57	Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS	<ul style="list-style-type: none"> - KHG Pulau Bengkalis - KHG Pulau Tebing Tinggi - KHG Sungai Kampar - Sungai Gaung - KHG Sungai Gaung - Sungai Batang Tuaka - KHG Sungai Kapuas - Sungai Terentang 	Shp		
58	Direktur Eksekutif J-PAL SEA	Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016 (pdf)	pdf	Seluruh Indonesia	

No	Pemohon	Jenis Data	Format Data	Cakupan	Keterangan
59	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Peta Kawasan Hutan, Penutupan Lahan Tahun 2016, sebaran KPH, Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS), Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru (PIPIB) revisi XII	Shp	Wilayah Papua dan Papua Barat	
60	Ditjen KSDAE	Data Gambut Feg Khg	.Shp	Kawasan Konservasi	
61	Badan Restorasi Gambut	Data Kebakaran Hutan Tahun 2015-2016	.Shp	Seluruh Indonesia	
62	BAPPENAS	Data Das Hutan Adat Ippkh Lahan Kritis Transmigrasi	.Shp	Seluruh Indonesia	
63	BIN	Kawasan Hutan Kesatuan Hidrologis Gambut Cetak Sawah Baru PIPPIB PIAPS TORA	.Shp	Seluruh Indonesia	
64	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Kawasan Hutan 2016	.Shp	Kabupaten Purbalingga	
65	BPS	Tutupan Lahan Tahun 2013-2016 Batas Provinsi Klasifikasi Tutupan Lahan	.Shp	Seluruh Indonesia	
66	KKP	PIPIB	.Shp	Pelabuhan Perikanan Paumako Kabupaten Mimika	
67	Forclime	Penutupan Lahan Tahun 1990-2016	.Shp	Kab.Kapuas Hulu, Berau, Malinau	
68	Badan Intelejen Keamanan Polri	Data IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI	Shp	Seluruh Indonesia	
69	BIG	Data Penutupan Lahan tahun 2014	Shp	Kalimantan Barat	
70	PDASHL Agam Kuantan	Data Penutupan Lahan tahun	Shp	DAS Agam Kuantan	

No	Pemohon	Jenis Data	Format Data	Cakupan	Keterangan
71	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Peta Citra Spot 6	Ecw	Pulau Sumatera	
72	Direktur Perencanaan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Penetapan IUPHHK Hasil Tata Batas Areal Kerja PT. Permata Borneo Abadi	Shp	Kab.Kutai Timur	
73	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu Utara	- FEG 2017 - Lahan kritis, potensi banjir, dan longsor tahun 2015 - Data dank ode penutupan lahan tahun 2016 - PIPPIB Revisi XIIItahun 2017	shp	Labuhanbatu	
74	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	- IUPHHK-HA - IUPHHK-HTI - IUPHHK-RE - IPPKH - Hutan Desa - HKM - HTR - Hutan Adat - FEG	Shp	Kalimantan Barat	
75	Rina Marlina (IPB)	- Penutupan lahan 2006, 2011, 2016	shp	Lombok Tengah	

1.2.2 Pengelolaan Jaringan Data Spasial LHK

Dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan informasi geospasial, Sub Direktorat Jaringan Data Spasial mengelola berbagai peralatan dan mesin sebagai sarana dalam menunjang kegiatan pengelolaan basis data spasial dan jaringan komunikasi data spasial LHK pusat dan daerah. Jaringan komunikasi data spasial kehutanan pusat dan daerah didukung oleh peralatan dan mesin yang memadai sehingga data spasial kehutanan dapat diakses oleh public. Peralatan dan mesin pendukung jaringan data spasial kehutanan terdiri atas: Server sebanyak 7 unit yang digunakan untuk database, webgis1, webgis2, appgis, nfms, citra, inventarisasi hutan, Komputer/laptop, Scanner, Plotter, Printer

Untuk menjaga masa hidup peralatan dan mesin agar dapat bertahan lebih lama dengan manfaat yang optimal, penting untuk selalu melakukan pemeliharaan (*maintenance*) terutama pada peralatan yang sehari-hari dipergunakan. Di samping itu, pemeliharaan ini juga dimaksudkan untuk

meningkatkan unjuk kerja sesuai spesifikasi piranti keras (hardware) serta spesifikasi pekerjaan. Pada tahun anggaran 2017 telah dilakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin sebagai berikut:

- PC Desktop dan Laptop sebanyak 14 unit
- Server sebanyak 7 unit
- Printer sebanyak 5 unit
- AC ruang server sebanyak 2 unit

Dalam rangka pengamanan data yang dikelola di unit kliring, maka telah dilakukan pengadaan antivirus server (7 unit) dan antivirus untuk PC (15 unit), serta back up data secara rutin tiap bulan.

1.2.3 Penyempurnaan Webgis KHLK

Webgis Kementerian LHK (webgis.menlhk.go.id) merupakan aplikasi yang menyediakan akses terhadap data dan informasi spasial kehutanan secara mudah dan cepat yang mendorong pemanfaatan serta pengintegrasian data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan. WEBGIS Kementerian LHK merupakan sarana penyebarluasan data spasial lingkungan hidup dan kehutanan kepada pengguna/masyarakat luas. Melalui WebGIS, pengguna dapat memperoleh informasi keberadaan data spasial, melihat data spasial, memperoleh data spasial dan menggunakan data spasial. Guna meningkatkan kapasitas layanan dan membangun citra positif, menjalin hubungan online/dalam jaringan interaktif dengan lembaga/instansi lain, pada tahun 2017 dilakukan kegiatan penyempurnaan WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penambahan fitur dan perbaikan tampilan dalam aplikasi WebGIS yang lebih baik, lebih interaktif dan informatif.

Dalam rangka pembaharuan informasi geospasial yang disajikan pada webgis KLHK, maka pada tahun 2017 telah dilaksanakan update data spasial meliputi :

1. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
2. Penutupan Lahan
3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
4. KHDTK
5. KPH
6. Kawasan Hutan
7. Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Kebun
8. Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Transmigrasi
9. Arah Pemanfaatan Hutan Produksi
10. IUPHHK-HA/HTI/RE
11. Hutan Desa
12. Hutan Kemasyarakatan

- 13. Hutan Tanaman Rakyat
- 14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 15. Mangrove

1.2.4 *Pemeliharaan dan pengoperasian ultralight*

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja pesawat terbang *microlight trike* dan meningkatkan umur pakai baik secara teknis maupun ekonomis pesawat terbang *microlight trike* di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka tiap tahun dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin terhadap pesawat *microlight trike*. Selain pemeliharaan rutin juga dilaksanakan kegiatan pemeliharaan berkala per 50 jam terbang.

1.2.5 *Inhouse Training Pemotretan Udara*

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pengelola pesawat Microlight Trike baik yang ada di BPKH, maupun di Dit. IPSDH, pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan inhouse training pemotretan pada tanggal 17 s/d 21 April bertempat di Tanjung Lesung prov. Banten, dengan peserta sebanyak 30 orang (22 orang dari BPKH, 3 orang dari Dit. IPSDH, dan 5 orang dari Taman Nasional).

1.2.6 *Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta*

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian LHK, Direktorat IPSDH ditetapkan sebagai unit kliring data spasial lingkup KLHK mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG. Selain itu pada tahun 2016 Dit. IPSDH ditunjuk sebagai koordinator kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta lingkup KLHK, dimana KLHK mendapat tugas untuk bertanggung jawab dalam pembuatan peta tematik sebanyak 9 tema dari 85 tematik (Lampiran Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta) yaitu :

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tatabatas) minimal pada skala 1:50.000
2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000
3. Peta Hutan Tanaman Rakyat minimal pada skala 1:50.000
4. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) minimal pada skala 1:50.000
5. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) pada skala 1:250.000
6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal pada skala 1:50.000
7. Peta Penunjukan Kawasan Hutan pada skala 1:250.000

8. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional minimal pada skala 1:50.000
9. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan minimal pada skala 1:50.000

Tahun 2017 Kementerian LHK bertanggung jawab terhadap 8 Tema, karena tematik Peta Zonasi Kawasan Konservasi perairan sudah selesai pada tahun 2016. Untuk penilaian pada tahun 2017, Peta Zona KK perairan yang sudah mendapat nilai 100 digabung masuk ke Tema Peta Zonasi Kawasan Konservasi.

Berkenaan dengan adanya Surat Sekretaris Tim PKSP No. S-201/D.VI.M.EKON/11/2017 Tanggal 3 November 2017, pelaksanaan KSP tahun 2018 KLHK mendapat tambahan tugas 1 tema yaitu pembuatan peta Hutan Adat.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta, pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan koordinasi ke walidata yang terkait, BIG, BPKH dan instansi lain di daerah, serta ground check (7 lokasi), mengikuti pelaksanaan klinik fasilitasi integrasi IGT yang diselenggarakan oleh Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Hasil capaian pelaksanaan percepatan KSP tahun 2017 lingkup KLHK sebagai berikut :

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tata batas) 19 provinsi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.
2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) 12 provinsi (6 provinsi wilayah Sumatera dan 6 provinsi wilayah Sulawesi).
3. Update Peta Hutan Tanaman Rakyat (28 provinsi)
4. Update Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) (21 provinsi)
5. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) 34 provinsi
6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) 16 provinsi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan 3 provinsi wilayah Kalimantan.
7. Update Peta Penunjukan Kawasan Hutan (34 provinsi)
8. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional 14 provinsi.

Dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan, pada tahun 2017 telah disusun buku Basis Data Spasial Kehutanan Tahun 2017, leaflet serta beberapa media publikasi lainnya seperti : tali name tag, bag. Penyusunan buku basis data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Kegiatan

Pengelolaan Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun tujuannya adalah untuk mempublikasikan informasi basis data spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk buku sehingga pengguna yang dapat memanfaatkan basis data geospasial kehutanan menjadi semakin luas.

Adapun saran publikasi lainnya disusun dalam mendukung penyebaran informasi tentang pengelolaan data geospasial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada publik/masyarakat sehingga dapat disebarluaskan dalam kegiatan kegiatan seperti pameran.

1.2.7 *Pengelolaan Jaringan Data Spasial LHK*

Dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan informasi geospasial, Sub Direktorat Jaringan Data Spasial mengelola berbagai peralatan dan mesin sebagai sarana dalam menunjang kegiatan pengelolaan basis data spasial dan jaringan komunikasi data spasial LHK pusat dan daerah. Jaringan komunikasi data spasial kehutanan pusat dan daerah didukung oleh peralatan dan mesin yang memadai sehingga data spasial kehutanan dapat diakses oleh public. Peralatan dan mesin pendukung jaringan data spasial kehutanan terdiri atas: Server sebanyak 7 unit yang digunakan untuk database, webgis1, webgis2, appgis, nfms, citra, inventarisasi hutan, Komputer/laptop, Scanner, Plotter, Printer

Untuk menjaga masa hidup peralatan dan mesin agar dapat bertahan lebih lama dengan manfaat yang optimal, penting untuk selalu melakukan pemeliharaan (*maintenance*) terutama pada peralatan yang sehari-hari dipergunakan. Di samping itu, pemeliharaan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan unjuk kerja sesuai spesifikasi piranti keras (*hardware*) serta spesifikasi pekerjaan. Pada tahun anggaran 2017 telah dilakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin sebagai berikut:

- PC Desktop dan Laptop sebanyak 14 unit
- Server sebanyak 7 unit
- Printer sebanyak 5 unit
- AC ruang server sebanyak 2 unit

Dalam rangka pengamanan data yang dikelola di unit kliring, maka telah dilakukan pengadaan antivirus server (7 unit) dan antivirus untuk PC (15 unit).

1.2.8 *Penyempurnaan Webgis KHLK*

Webgis Kementerian LHK (webgis.menlhk.go.id) merupakan aplikasi yang menyediakan akses terhadap data dan informasi spasial kehutanan secara mudah dan cepat yang mendorong pemanfaatan serta pengintegrasian data

dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan. WEBGIS Kementerian LHK merupakan sarana penyebarluasan data spasial lingkungan hidup dan kehutanan kepada pengguna/masyarakat luas. Melalui WebGIS, pengguna dapat memperoleh informasi keberadaan data spasial, melihat data spasial, memperoleh data spasial dan menggunakan data spasial. Guna meningkatkan kapasitas layanan dan membangun citra positif, menjalin hubungan online/dalam jaringan interaktif dengan lembaga/instansi lain, pada tahun 2017 dilakukan kegiatan penyempurnaan WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penambahan fitur dan perbaikan tampilan dalam aplikasi WebGIS yang lebih baik, lebih interaktif dan informative.

1.2.9 *Pemeliharaan dan pengoperasian ultralight*

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja pesawat terbang *microlight trike* dan meningkatkan umur pakai baik secara teknis maupun ekonomis pesawat terbang *microlight trike* di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka tiap tahun dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin terhadap pesawat *microlight trike*. Selain pemeliharaan rutin juga dilaksanakan kegiatan pemeliharaan berkala per 50 jam terbang.

1.2.10 *Inhouse Training Pemotretan Udara*

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pengelola pesawat Microlight Trike baik yang ada di BPKH, maupun di Dit. IPSDH, pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan inhouse training pemotretan pada tanggal 17 s/d 21 April bertempat di Tanjung Lesung prov. Banten, dengan peserta sebanyak 30 orang (22 orang dari BPKH, 3 orang dari Dit. IPSDH, dan 5 orang dari Taman Nasional).

1.2.11 *Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta*

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian LHK, Direktorat IPSDH ditetapkan sebagai unit kliring data spasial lingkup KLHK mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG. Selain itu pada tahun 2016 Dit. IPSDH ditunjuk sebagai koordinator kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta lingkup KLHK, dimana KLHK mendapat tugas untuk bertanggung jawab dalam pembuatan peta tematik sebanyak 9 tema dari 85 tematik (Lampiran Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta) yaitu :

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tatabatas) minimal pada skala 1:50.000

2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000
3. Peta Hutan Tanaman Rakyat minimal pada skala 1:50.000
4. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) minimal pada skala 1:50.000
5. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) pada skala 1:250.000
6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal pada skala 1:50.000
7. Peta Penunjukan Kawasan Hutan pada skala 1:250.000
8. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional minimal pada skala 1:50.000
9. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan minimal pada skala 1:50.000

Tahun 2017 Kementerian LHK bertanggung jawab terhadap 8 Tema, karena tematik Peta Zonasi Kawasan Konservasi perairan sudah selesai pada tahun 2016. Untuk penilaian pada tahun 2017, Peta Zona KK perairan yang sudah mendapat nilai 100 digabung masuk ke Tema Peta Zonasi Kawasan Konservasi. Berkenaan dengan adanya Surat Sekretaris Tim PKSP No. S-201/D.VI.M.EKON/11/2017 Tanggal 3 November 2017, pelaksanaan KSP tahun 2018 KLHK mendapat tambahan tugas 1 tema yaitu pembuatan peta Hutan Adat.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta, pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan koordinasi ke walidata yang terkait, BIG, BPKH dan instansi lain di daerah, serta ground check (7 lokasi), mengikuti pelaksanaan klinik fasilitasi integrasi IGT yang diselenggarakan oleh Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Hasil capaian pelaksanaan percepatan KSP tahun 2017 lingkup KLHK sebagai berikut :

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tata batas) 19 provinsi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.
2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) 12 provinsi (6 provinsi wilayah Sumatera dan 6 provinsi wilayah Sulawesi).
3. Update Peta Hutan Tanaman Rakyat (28 provinsi)
4. Update Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) (21 provinsi)
5. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) 34 provinsi
6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) 16 provinsi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan 3 provinsi wilayah Kalimantan.
7. Update Peta Penunjukan Kawasan Hutan (34 provinsi)
8. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional 14 provinsi.

4. Data Anggaran Pendukung Kegiatan Tahun 2017

Realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 4.652.280.238,- (Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau 97,14 persen dari pagu yang dianggarkan. Pagu dan realisasi keuangan per Sub Direktorat lingkup Direktorat IPSDH Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Subdit/Subbag Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017

SUB DIREKTORAT/ SUB BAGIAN	PAGU TAHUN 2017 (Rp)	REALISASI TA 2017			DEVIASI KEU
		Keuangan		Fisik	
		Rp	%	%	
INHUT	825,280,000	805.900.164	97.36	100.00	2.64
PSDH	855,660,000	848.305.299	99.03	100.00	0.97
PDTK	834,430,000	820.497.700	98.34	100.00	1.66
JDS	845,450,000	806.204.202	95.34	100.00	4.66
TU	1,428,213,000	1.371.372.873	96.35	100.00	3.65
JUMLAH	4,789,033,000	4,653,280,238	97.14	100.00	2.86

Tabel 26. Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Sasaran Kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2017

No.	Sasaran	Target	Pagu 2017	Realisasi 2017		
				Keuangan		Fisik
				Rp	%	%
1	Layanan Perkantoran	12 Bulan	1,163,525,000	1,112,729,280	95.63	100.00
2	Data dan Informasi SDH Nasional	34 Provinsi	1,546,260,000	1,521,557,983	98.40	100.00
3	KPH yang Yang Telah Memiliki Data dan Informasi Sumber	100 KPH	101,380,000	100,581,000	97.21	100.00

No.	Sasaran	Target	Pagu 2017	Realisasi 2017		
				Keuangan		Fisik
				Rp	%	%
	Daya Hutan					
4	Data dan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	34 Provinsi	1,815,378,000	1,763,188,305	97.13	100.00
5	Pengadaan Perangkat Data dan Komunikasi	1 Layanan	162,490,000	154,223,670	94.91	100.00
Jumlah Total			4,789,033,000.00	4,653,280,238	97.14	100.00

Realisasi berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Serapan DIPA TA 2017 berdasarkan Sumber Dana

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi s.d Desember 2017	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai	RM		-	-
Belanja Barang	RM	3.080.858.000	3.041.606.585	98,73
	PNBP	1.495.685.000	1.408.799.983	94,19
Belanja Modal	RM	212.490.000	201.873.670	95,00
TOTAL		4.789.033.000	4.652.280.238	97,14

Realisasi untuk Peralatan dan fasilitas perkantoran diperuntukan guna mendukung kegiatan operasional perkantoran dengan realisasi keuangan sebesar Rp 154.223.670,- atau 94.91 persen dari yang dianggarkan dan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar 100%.

Tabel 28. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran s.d Desember 2017

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PERHITUNGAN TAHUN 2017		PROGRES KEGIATAN	REALISASI		
		VOLUME	BIAYA		KEUANGAN		FISIK
					Rp.	%	%
029.06.09	Program Planologi dan Tata Lingkungan						
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	- Hard Disk Eksternal	4 UNIT	10.000.000	4 UNIT	9.932.120	99,32	100,00
	- Printer	1 UNIT	5.300.000	1 UNIT	4.790.000	90,38	100,00
	- UPS	1 UNIT	20.000.000	1 UNIT	17.876.430	89,38	100,00
	- Personal Computer	2 UNIT	23.000.000	2 UNIT	22.310.420	97,00	100,00
	- Scanner	2 UNIT	15.000.000	2 UNIT	12.860.000	85,73	100,00
	- Laptop	1 UNIT	20.000.000	1 UNIT	17.265.700	86,33	100,00
	- Scanner A0	1 UNIT	69.190.000	1 UNIT	69.189.000	100,00	100,00
	Total		162.490.000		154.223.670	94,91	100,00

5. Hal yang Perlu Mendapat Perhatian untuk Peningkatan Kinerja yang Akan Datang

- a. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Penetapan Kinerja agar dapat segera ditentukan kebijakan yang perlu dilakukan, sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik secara tata waktu maupun hasil.
- b. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, baik dari segi teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan pencapaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan untuk mendukung Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2017 adalah sebesar 100 %, skala pengukuran 100% juga dicapai pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2016.
2. Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan (31 kegiatan) dan sasaran (4 sasaran) tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*.

MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER ADAYA HUTAN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terbaruannya Data dan Informasi SDH Nasional dan seluruh KPH	Data dan Peta SDH Mendukung Pengalokasian KH untuk Perhutanan Sosial	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Nasional (34 Provinsi)	Penyusunan NSDH Nasional	Tersusunnya Buku NSDH Nasional	Buku NSDH Nasional
							Penyusunan Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan	Tersusunnya Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan	Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan
							Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional	Terselenggaranya Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional	Laporan Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional
							Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi
							Uji Petik Inventarisasi Hutan Nasional	Terlaksananya Uji Petik Inventarisasi Hutan Nasional	Laporan Uji Petik Inventarisasi Hutan Nasional
							Penghitungan Potensi SDH Nasional	Tersedianya Data Potensi SDH Nasional	Data Potensi SDH Nasional
							Pembuatan Peta NSDH	Tersedianya Dokumen Peta NSDH	Dokumen Peta NSDH
			Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	Terselenggaranya Pemantauan SDH Nasional	Hasil/Pelaksanaan Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional	Terlaksananya Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional	Laporan Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan
							Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	Tersedianya Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	Laporan Penutupan Lahan Tingkat Nasional
							Kompilasi Hasil Update Data Penutupan Lahan Dalam Rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya Hasil Update Data Penutupan Lahan Dalam Rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan Hasil Update Data Penutupan Lahan Dalam Rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan
							Penelaahan Penutupan Lahan pada Areal IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi sedang/tinggi	Tersedianya Data Penutupan Lahan pada Areal IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi sedang/tinggi	Laporan Penutupan Lahan pada Areal IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi sedang/tinggi
							Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh	Terselenggaranya Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh	Laporan Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh
							Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terselenggaranya Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan
							Pengecekan Lapangan Data Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat untuk Accuracy Assesment (4 Lokasi)	Terselenggaranya Pengecekan Lapangan Data Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat untuk Accuracy Assesment (4 Lokasi)	Laporan Pengecekan Lapangan Data Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat untuk Accuracy Assesment (4 Lokasi)
		Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH pada KPH	Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH pada KPH	Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	100 KPH	Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)	Laporan Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)
							Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH	Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH KPH	Laporan Data dan Informasi Potensi SDH KPH
		Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional	Terselenggaranya Pemetaan SDH Nasional	Hasil/Pelaksanaan Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	Tersedianya Laporan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	Laporan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan
		Update Peta (One Map Policy)					Penghitungan Deforestasi Indonesia	Tersedianya Laporan Deforestasi Indonesia	Laporan Deforestasi Indonesia
							Penelaahan Peta Tematik Kehutanan	Tersedianya Laporan Hasil Telaah Peta Tematik Kehutanan	Laporan Hasil Telaah Peta Tematik Kehutanan
							Dokumentasi Data dan Peta	Terselenggaranya Dokumentasi Data dan Peta	Laporan Dokumentasi Data dan Peta
							Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan	Terselenggaranya Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan	Laporan Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan
							Pemetaan Areal Indikatif Penundaaan Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Tersedianya Dokumen Pemetaan Areal Indikatif Penundaaan Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Dokumen Pemetaan Areal Indikatif Penundaaan Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
			Penyelenggaraann Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Terselenggaranya Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi	Penyusunan Basis Data Spasial LHK	Tersedianya Laporan penyusunan Basis Data Spasial LHK	Laporan Penyusunan Basis Data Spasial LHK
							Pengelolaan Jaringan Data Spasial LHK	Terselenggaranya Pengelolaan Jaringan Data Spasial LHK	Laporan Pengelolaan Jaringan Data Spasial LHK
							Penyempurnaan WEBGIS LHK	Terselenggaranya Penyempurnaan WEBGIS LHK	Laporan Penyempurnaan WEBGIS LHK
							Inhouse Training Pemotretan Udara	Terselenggaranya Inhouse Training Pemotretan Udara	Laporan Inhouse Training Pemotretan Udara

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan
							Pengoperasian dan Pemeliharaan Microlight Trike	Terpeliharanya Microlight Trike	Laporan Pengoperasian dan Pemeliharaan Microlight Trike
							Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Terselenggaranya Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Laporan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
				Good Governance Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai sakin minimal 78		Pelayanan Operasional Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Operasional Perkantoran	Dokumen Pelayanan Perkantoran
							Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Tersedianya Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Dokumen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
							Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan
							Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Laporan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
							Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Terlaksananya Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Laporan Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
Jabatan : Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	34 Provinsi
		Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH
		Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 Provinsi
2.	Terlaksananya penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	33 Provinsi
3.	Dukungan Manajemen Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Anggaran

Rp. 9.608.605.000,- (*sembilan milyar enam ratus delapan juta enam ratus lima ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan,



Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001